PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN KAS DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP LIKUIDITAS PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) DI KABUPATEN KENDAL

SKRIPSI

Disusun dalam rangka penyelesaian studi Strata I
untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Dian Kusuma Pratiwi

3351405022

Akuntansi S1

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Partono Thomas, M.S.	**Muh. Khafid, S.Pd., M.Si.**
NIP. 195212191982031002	NIP.197510101999031001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi

Amir Mahmud, S.Pd., M.Si.
NIP. 197212151998021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Agustus 2009

Penguji Skripsi,

Drs. Heri Yanto, MBA
NIP. 196307181987021001

Anggota I

Drs. Partono Thomas, M.S.
NIP. 195212191982031002

Anggota II

Muh. Khafid, S.Pd., M.Si.
NIP. 197510101999031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Agus Wahyudin, M.Si
NIP. 196208121987021000

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikuitp atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juli 2009

Dian Kusuma Pratiwi
NIM. 3351405022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Jadilah seseorang yang bijak dengan tidak melihat masalah hanya dari satu sudut pandang saja, tapi lihatlah dari sudut pandang yang lain" (Penulis).

Persembahan:

1. *Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas segala pengorbanan, doa dan kasih sayang yang tak pernah pudar.*
2. *Mbak nink, Mas Ari, Dek Prastyo dan keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendoakanku.*
3. *Kekasihku safry, yang selalu memotivasi, mendoakanku dan menemani disetiap langkahku.*
4. *Sahabatku (Ana, Pipit, Riska, Reni, Eny, Erna) yang selalu memberiku semangat dan dukungan. Thanks atas tawa yang telah tercipta selama ini dan semoga persahabatan kita utuh selamanya.*
5. *Teman-teman "Sakura Kost" semuanya, terimakasih atas perhatiannya.*
6. *Teman-teman Akuntansi '05 mari berjuang bersama.*
7. *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kas dan Perputaran Piutang Terhadap Likuiditas Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kendal".** Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Agus Wahyudin, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
3. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Partono Thomas, M.S., Dosen Pembimbing I yang telah sabar dan teliti memberikan petunjuk, dorongan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
5. Muh. Khafid, S.Pd., M.Si., Dosen Pembimbing II yang telah sabar dan teliti memberikan petunjuk, dorongan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
6. Drs. Heri Yanto, MBA., Dosen Penguji yang telah memberikan petunjuk dan masukan terhadap penulisan skripsi ini.

7. Bambang Suhardijo, SP., Ketua Pengurus PKPRI Kabupaten Kendal yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh data-data penelitian.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini.

Tidak ada sesuatupun yang dapat penulis berikan sebagai imbalan kecuali untaian doa, “Semoga amal baik yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT”. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, Juli 2009

Penulis

SARI

Dian Kusuma Pratiwi. 2009. *Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kas dan Perputaran Piutang terhadap Likuiditas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kendal*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Drs. Partono Thomas, M.S dan Muh. Khafid, S.Pd, M.Si.

Kata Kunci : Efektivitas Pengendalian Intern Kas, Perputaran Piutang, dan Likuiditas

Berdasarkan hasil survey pendahuluan sebagian besar KPRI di Kabupaten Kendal mempunyai rasio likuiditas yang tinggi di atas standar normal yang ditetapkan oleh Kep. Men. Kop. dan UKM No.22 tahun 2007 yaitu 200%. Oleh kerena itu perlu diketahui hal yang mempengaruhi likuiditas. Apakah hal tersebut berkaitan dengan efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah efektivitas pengendalian intern kas pada KPRI di Kabupaten Kendal? (2) Bagaimanakah perputaran piutang pada KPRI di Kabupaten Kendal? (3) Bagaimanakah likuiditas pada KPRI di Kabupaten Kendal? (4) Adakah pengaruh tingkat efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap likuiditas pada KPRI di Kabupaten Kendal?.

Populasi penelitian ini adalah seluruh KPRI yang ada di Kabupaten Kendal dan terdaftar di PKPRI yang berjumlah 85 KPRI. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga didapat sampel dengan jumlahnya 30 KPRI. Data yang digunakan berupa data primer yaitu hasil pengisian angket dan data sekunder yang berupa laporan keuangan. Variabel yang diukur adalah efektivitas pengendalian intern kas (X_1) dan perputaran piutang (X_2) dan likuiditas (Y) yang dinilai menggunakan *current ratio, acid test ratio* dan *cash ratio*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode angket. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase dan analisis regresi linier berganda.

Hasil analisis deskriptif diperoleh tingkat efektivitas pengendalian intern kas sebesar 67,36% dalam kriteria efektif. Berdasarkan perhitungan rasio perputaran piutang sebesar 35,39% dengan kriteria kurang ideal. Nilai *current ratio* sebesar 414,33% dalam kriteria cukup ideal. *Acid test ratio* sebesar 402,62% dalam kriteria cukup ideal. *Cash ratio* sebesar 22,59% dalam kriteria cukup ideal. Dari hasil perhitungan analisis regresi berganda terdapat pengaruh yang signifikan efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap likuiditas. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh secara simultan yang diberikan efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap *current ratio* sebesar 52,8%, terhadap *acid test ratio* 52,0% dan terhadap *cash ratio* 38,5%. Sedangkan secara parsial efektivitas pengendalian intern kas memberikan pengaruh signifikan terhadap *current ratio*, terbukti dengan t_{hitung} = 3,421 dengan tingkat probabilitas 0,002 < 0,05; terhadap *acid test ratio*, terbukti dengan t_{hitung} =3,379 dengan tingkat probabilitas 0,002 < 0,05. Namun, secara parsial efektivitas pengendalian

intern kas tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap *cash ratio*, terbukti dengan t_{hitung} = 1,869 dengan tingkat probabilitas 0,073 > 0,05. Sedangkan secara parsial perputaran piutang tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap *current ratio*, *acid test ratio*, *cash ratio*. Hal ini terbukti dengan tingkat probabilitas *current ratio* 0,328 > 0,05; tingkat probabilitas *acid test ratio* 0,346 > 0,05; tingkat probabilitas *cash ratio* 0,137 > 0,05.

KPRI di Kabupaten Kendal hendaknya mempertahankan dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern kas yang telah ada serta memacu perputaran piutang pada titik yang optimal sehingga tingkat likuiditas yang ideal terpenuhi. Selain itu pihak KPRI hendaknya meningkatkan likuiditas pada tingkat yang sangat ideal. Hal ini dapat dilakukan misalnya pihak KPRI melakukan pembinaaan atau pelatihan terhadap karyawan KPRI tentang pentingnya likuiditas. Jika sewaktu-waktu harus membayar utang jangka pendeknya pada kreditur maka KPRI mampu memenuhinya tepat waktu, namun tidak mempunyai dana yang menganggur.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

PENGESAHAN KELULUSAN ..... **iii**

PERNYATAAN ..... **iv**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

SARI ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Perumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian 8

1.5 Penegasan Istilah 8

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Likuiditas 10

2.1.1 Pengertian Likuiditas 10

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas 12

2.1.3 Pengukuran dan Penilaian Likuiditas 15
2.2 Kas 18
2.2.1 Pengertian Kas 18
2.2.2 Aliran Kas 19
2.3 Sistem Pengendalian Intern 19
2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern 19
2.3.2 Unsur Sistem Pengendalian Intern 21
2.3.3 Tujuan Sistem Pengendalian Intern 24
2.3.4 Sistem Pengendalian Intern Kas 25
2.4 Piutang 40
2.4.1 Pengertian Piutang 40
2.4.2 Perputaran Piutang 42
2.5 Kerangka Berpikir 43
2.6 Hipotesis 47
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 48
3.2 Populasi dan Sampel 48
3.2.1 Populasi 48
3.2.2 Sampel 48
3.3 Variabel Penelitian dan Pengukurunnya 50
3.4 Jenis dan Sumber Data 54
3.5 Metode Pengumpulan Data 54
3.6 Teknik Pengukuran Validitas dan Reliabilitas Instrumen 56

3.6.1 Validitas 56
3.6.2 Relibilitas 58
3.7 Metode Analisis Data 59
3.7.1 Analisis Deskriptif Persentase 59
3.7.2 Uji Normalitas 61
3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda 62
3.7.4 Uji Asumsi Klasik 65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.Hasil Penelitian 69
4.1.1 Gambaran Umum KPRI di Kabupaten Kendal 69
4.1.2 Struktur Organisasi KPRI di Kabupaten Kendal 71
4.1.3 Deskriptif Variabel Penelitian 74
4.1.4 Analisis Regresi 78
4.1.5 Uji Asumsi Klasik 86
4.2.Pembahasan 88
BAB V PENUTUP
5.1.Simpulan 98
5.2.Saran 99
DAFTAR PUSTAKA 101
LAMPIRAN 103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Standar Rasio Perputaran Piutang 43

Tabel 3.1 Sampel Penelitian 49

Tabel 3.2 Standar Rasio Likuiditas 52

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 53

Tabel 3.4 Hasil Uji Coba Angket 57

Tabel 3.5 Uji Reliabelitas Variabel 58

Tabel 3.6 Kriteria Deskriptif Presentase 60

Tabel 3.7 Pengujian Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* 62

Tabel 4.1 Standar *current ratio* 77

Tabel 4.2 Standar *acid test ratio* 77

Tabel 4.3 Standar *cash ratio* 78

Tabel 4.4 Ringkasan analisis regresi efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap *current ratio* 80

Tabel 4.5 Ringkasan analisis regresi efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap *acid test ratio* 82

Tabel 4.6 Ringkasan analisis regresi efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap *cash ratio* 85

Tabel 4.7 *Collinearity Statistic* Efektivitas Pengendalian Intern Kas dan Perputaran Piutang 87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir 47

Gambar 2. Struktur Organisasi KPRI di Kabupaten Kendal 72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kas dan Perputaran Piutang terhadap Likuiditas pada KPRI di Kabupaten Kendal (Angket)..... 103
Lampiran 2 Instrumen Penelitian Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kas dan Perputaran Piutang terhadap Likuiditas pada KPRI di Kabupaten Kendal (Pedoman Dokumentasi)..... 106
Lampiran 3 Tabel Perhitungan Validitas dan Reliabelitas..... 108
Lampiran 4 Perhitungan Validitas Angket Penelitian..... 110
Lampiran 5 Perhitungan Reliabelitas Angket Penelitian..... 111
Lampiran 6 Data Efektivitas Pengendalian Intern Kas KPRI di Kabupaten Kendal..... 112
Lampiran 7 Deskripsi Efektivitas Pengendalian Intern Kas di KPRI Kabupaten Kendal..... 114
Lampiran 8 Perhitungan Rasio Perputaran Piutang..... 115
Lampiran 9 Data Perputaran Piutang KPRI di Kabupaten Kendal..... 116
Lampiran 10 Perhitungan *Current Ratio* KPRI di Kabupaten Kendal Tahun 2007..... 117
Lampiran 11 Perhitungan *Acid Test Ratio* KPRI di Kabupaten Kendal Tahun 2007..... 118
Lampiran 12 Perhitungan *Cash Ratio* KPRI di Kabupaten Kendal Tahun 2007..... 119
Lampiran 13 Data Likuiditas KPRI di Kabupaten Kendal..... 120
Lampiran 14 Data Variable Penelitian..... 121

Lampiran 15 Analisa Regresi antara Efektivitas Pengendalian Intern Kas dan Perputaran Piutang terhadap *Current Ratio* 122
Lampiran 16 Analisa Regresi antara Efektivitas Pengendalian Intern Kas dan Perputaran Piutang terhadap *Acid Test Ratio* 124
Lampiran 17 Analisa Regresi antara Efektivitas Pengendalian Intern Kas dan Perputaran Piutang terhadap *Cash Ratio* 126
Lampiran 18 Surat Ijin Survey Pendahuluan 128
Lampiran 19 Surat Ijin Penelitian 129
Lampiran 20 Surat Rekomendasi Penelitian 130
Lampiran 21 Surat Keterangan Melakukan Penelitian 131
Lampiran 22 Laporan Neraca dan Laporan Laba/Rugi Tahun 2007 KPRI di Kabupaten Kendal 132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansiilnya yang segera harus dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada saat tertentu merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, maka likuiditas suatu usaha berarti kemampuan perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kewajiban finansiilnya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa pengertian likuiditas dimaksudkan sebagai perbandingan antara jumlah uang tunai dan aktiva lain yang dapat disamakan dengan uang tunai di satu pihak dengan jumlah utang lancar di lain pihak (likuiditas badan usaha) (Riyanto 2001: 26).

Kas merupakan harta lancar dengan tingkat likuiditas yang paling tinggi dan paling sering berubah jumlahnya. Karena hampir sebagian besar transaksi usaha melibatkan kas atau berakhir di kas. Kas dapat berupa uang tunai yang berada dalam perusahaan atau bank. Makin besar jumlah kas yang ada di dalam perusahaan berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya. Perusahaan yang mempunyai investasi dalam kas yang cukup besar mungkin akan terhindar dari kesulitan keuangan. Tetapi investasi dalam kas yang berlebihan menyebabkan nilai perusahaan berkurang karena *opportunity revenue* yang

hilang. Investasi dalam kas tidak menghasilkan pendapatan (Muslich 2000: 98). Sebaliknya bila terlalu kecil maka kondisi perusahaan akan illikuid bila sewaktu-waktu terjadi penagihan dari utang-utangnya tidak dapat membayarnya. Jumlah persediaan kas yang sebelumnya harus dipertahankan, ratio standard yang bersifat umum belum ada rumusnya tetapi HG. Guthman dalam (Indriyo, 2000: 66) menuliskan bahwa jumlah kas yang sebaiknya dipertahankan perusahaan yang dalam posisi keuangan yang baik hendaknya tidak kurang dari 5% - 10% dari jumlah aktiva lancar. Karena demikian pentingnya arti kas dalam mendukung likuiditas perusahaan (koperasi) maka perlu adanya pengendalian intern kas agar jumlah kas yang tersedia dapat memenuhi kewajiban finansial.

Bagi sebagian besar perusahaan (koperasi) yang melakukan penjualan kredit, piutang usaha dan wesel tagih merupakan bagian penting dari modal kerja dalam menilai likuiditas termasuk kualitas modal kerja dan rasio lancar. Pengalaman menunjukkan bahwa semakin lama piutang belum dilunasi malampaui tanggal jatuh temponya, semakin kecil kemungkinan piutang dapat ditagih. Tingkat perputaran merupakan indikator umur piutang. Tingkat perputaran piutang adalah kecepatan pelunasan piutang menjadi kas kembali. Tingkat perputaran piutang yang tinggi menunjukkan cepatnya dan terikat dalam piutang dengan kata lain cepatnya piutang dilunasi oleh debitur. Makin tinggi tingkat perputaran piutang maka makin cepat pula piutang menjadi kas. Selain itu cepatnya piutang dilunasi menjadi kas berarti kas akan dapat

digunakan kembali dan likuiditas yang baik akan dapat terpenuhi serta resiko kerugian piutang dapat diminimalkan.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan sebagian besar KPRI di Kabupaten Kendal mempunyai rasio likuiditas lebih dari 200 %, sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No.22 / PER / M.KUKM/VI/2007 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi rasio likuiditas yang lebih dari 200 % sangat tidak ideal. Salah satunya adalah KPRI Wiyata Tama di SMP Negeri 3 Patebon. Hal ini dapat diketahui dari laporan keuangan (neraca) pada tahun 2006 dan tahun 2007. Pada tahun 2006 jumlah aktiva lancar Rp 151.483.934,73 sedangkan jumlah utang lancar Rp 13.077.877,91 sehingga diperoleh rasio likuiditas sebesar 1158,32 %. Pada tahun 2007 jumlah aktiva lancar Rp 188.787.823,39 sedangkan jumlah utang lancar Rp 20.062.212,31 sehingga diperoleh rasio likuiditas sebesar 941,01 %. Ada beberapa hal yang menyebabkan tingginya rasio likuiditas pada KPRI antara lain karena masih ada karyawan yang kurang memahami kebijakan ataupun peraturan pedoman pengukuran kesehatan rasio keuangan dan tingginya jumlah piutang yang disebabkan oleh kecilnya tingkat perputaran piutang.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kendal, menurut studi pendahuluan berbentuk koperasi primer yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Jenis dari KPRI di Kabupaten Kendal mayoritas adalah koperasi serba usaha yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha tidak hanya satu unit, tetapi beberapa unit usaha

dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat koperasi bagi masyarakat dan lingkungan serta lebih meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Bidang usaha yang dikelola di KPRI kabupaten Kendal diantaranya meliputi usaha perkreditan atau simpan pinjam, usaha pertokoan atau konsumsi dan usaha jasa yang meliputi : foto copy, wartel, percetakan, sewa gedung,dan sebagainya. Di antara usaha yang paling menonjol adalah kegiatan usaha dibidang perkreditan (simpan pinjam).

Unit usaha di bidang perkreditan (simpan pinjam) yaitu menerima simpanan dari anggotanya dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman pada anggota. Unit usaha pertokoan menyediakan kebutuhan sehari-hari anggotanya dan juga melayani kebutuhan non anggota yaitu masyarakat dari luar. Dalam unit usaha pertokoannya, KPRI di Kabupaten Kendal melakukan penerimaan kas dalam bentuk tunai dan bentuk kredit. Dalam bentuk tunai langsung mendapatkan uang sebelum penyerahan barang, sedangkan dalam bentuk kredit, berarti mempunyai piutang kepada anggotanya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Tanpa adanya koordinasi yang baik dalam unit usaha tersebut memungkinkan adanya penggelapan kas, karena penerimaan kas oleh bagian kasir yang sekaligus merangkap sebagai pembuku kas, selain itu kas tidak langsung disetorkan ke bank pada hari yang sama pada saat melakukan transaksi namun menunggu uang tersebut terkumpul lebih dahulu yang sekiranya pantas disetorkan ke bank. Dari kedua unit usaha tersebut KPRI melakukan pengelolaan kas. Pengelolaan kas dilakukan agar koperasi selalu memiliki kas yang cukup sehingga jika pihak kreditur melakukan

penagihan sewaktu-waktu, maka koperasi dapat membayarnya karena keadaan kas yang selalu likuid. Dari unit usaha tersebut di atas, dapat terlihat bahwa aliran kas masuk *(cash inflow)* yakni simpanan dari anggota serta modal dari para kreditur pada anggota dan aliran kas keluar *(cash outflow)* yakni peminjaman dari pada anggota dan pengeluaran yang lain selalu terjadi.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, KPRI di Kabupaten Kendal juga dipacu untuk meningkatkan usaha, sehingga mengakibatkan berkembangnya kegiatan yang ditangani dan semakin luas jangkauan usaha yang dilakukan KPRI. Hal ini terlihat dengan bertambahnya saldo kas, meningkatnya jumlah anggota dan unit usaha yang dikelola. Agar likuiditas sebagai aspek penting dalam koperasi berupa alat analisis yang datanya akurat dan dapat diandalkan oleh pemakai laporan keuangan dan mencerminkan citra baik koperasi dalam hal kemampuan memenuhi kebutuhan finansialnya maka perlu didukung konsep pengendalian intern kas.

Beberapa penelitian tentang likuiditas telah banyak dilakukan. Endah Tri Hastuti (2006) menemukan bukti empiris bahwa ada pengaruh pengendalian intern penerimaan kas dan pengendalian intern pengeluaran kas terhadap likuiditas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kudus sebesar 47,3% dan sisanya 52,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Ana Sufiyanti (2007) melakukan penelitian bahwa efektivitas pengendalian intern kas memberikan pengaruh terhadap indikator likuiditas *pada* Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yaitu *current ratio* sebesar 34,2%,

terhadap *acid test ratio* 18,4%, dan terhadap *cash ratio* 13,0% yang relatif kecil. Mohammad Nur (2008) juga menemukan bukti empiris bahwa ada pengaruh signifikan antara perputaran piutang dan pengumpulan piutang terhadap likuiditas perusahaan pada CV. Bumi Sarana Jaya di Gresik dimana perputaran piutang mempunyai kontribusi sebesar 91,01% sedangkan pengumpulan piutang mempunyai kontribusi sebesar 94,87%.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, diketahui bahwa variabel-variabel yang diteliti berpengaruh terhadap likuiditas. Pada peneltian ini, peneliti ingin menguji kembali apakah efektivitas pengendalian intern kas yang meliputi struktur organisasi, sistem otorisasi, praktik yang sehat melalui bank serta sistem kas kecil dana tetap berpengaruh terhadap likuiditas pada KPRI di Kabupaten Kendal dengan menambahkan variabel yang sebelumnya belum pernah diteliti yaitu perputaran piutang.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian pada KPRI di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1. Sebelumnya belum ada penelitian tentang likuiditas pada KPRI di Kabupaten Kendal, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian tentang likuiditas yang digunakan sebagai pengukuran suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansiil yang harus segera dipenuhi.
2. Sebagai seseorang yang berasal dari daerah Kendal sendiri, maka peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana perkembangan KPRI di Kabupaten Kendal sehingga secara tidak langsung peneliti dapat memberikan sumbangsihnya dalam ilmu pengetahuan pada daerahnya

sendiri guna meningkatkan kemampuan yang lebih baik pada KPRI di Kabupaten Kendal.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **" Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kas dan Perputaran Piutang terhadap Likuiditas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kendal"**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas pengendalian intern kas pada KPRI di Kabupaten Kendal?
2. Bagaimanakah perputaran piutang pada KPRI di Kabupaten Kendal?
3. Bagaimanakah likuiditas pada KPRI di Kabupaten Kendal?
4. Adakah pengaruh tingkat efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap likuiditas pada KPRI di Kabupaten Kendal?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tingkat evefektivitas pengendalian intern kas pada KPRI di Kabupaten Kendal.
2. Untuk menganalisis tingkat perputaran piutang pada KPRI di Kabupaten Kendal.

3. Untuk menganalisis tingkat likuiditas pada KPRI di Kabupaten Kendal.
4. Untuk menguji seberapa besar pengaruh tingkat efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap likuiditas pada KPRI di Kabupaten Kendal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya akuntansi yang dapat digunakan sebagai bahan referensi yang dapat memberikan informasi teoritis maupun empiris, khususnya bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya dapat dipergunakan sebagai acuan untuk mengkaji permasalahan yang lebih relevan. Serta bagi peneliti, antara lain sebagai pembanding antara yang didapat dibangku perkuliahan dengan keadaan di lapangan.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, khususnya bagi KPRI di Kabupaten Kendal kaitannya dalam pelaksanaan pengendalian intern kas dan perputaran piutang agar lebih efektif dan efisien. Serta bagi pihak yang berkepentingan, sebagai kajian dalam menilai tentang keadaan likuiditas pada KPRI di Kabupaten Kendal.

1.5 Penegasan Istilah

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dan menyamakan persepsi terhadap judul penelitian ini perlu dijelaskan pengertian dari istilah yang akan digunakan :

1. Likuiditas

   Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan atau badan usaha untuk memenuhi kewajiban finansiilnya yang segera harus dipenuhi (Riyanto, 2001 : 25).

   Dalam penelitian ini likuiditas adalah kemampuan organisasi atau dalam hal ini KPRI untuk memenuhi kewajiban finansiil yang segera harus dipenuhi.

2. Efektivitas pengendalian intern kas

   Efektivitas pengendalian intern kas meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi berupa akses mengecek keteitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi dan efektivitaas penggunaan kas.

3. Perputaran piutang

   Perputaran piutang merupakan perbandingan penjualan neto kredit selama periode tertentu dengan jumlah rata-rata piutang (Riyanto, 2001:90).

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Likuiditas

2.1.1 Pengertian Likuiditas

Menurut Riyanto (2001:25) masalah likuiditas adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang harus segera dibayar. Sedangkan menurut Suharli dan Oktorina (2005) likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan mendanai operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Jadi likuiditas menunjukkan kemampuan koperasi untuk melunasi hutang jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Koperasi dikatakan likuid bila koperasi mampu membayar hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, dapat diketahui apakah koperasi mempunyai kemampuan membiayai kegiatannya selama beroperasi dengan baik dan lancar dengan hambatan yang semininal mungkin.

Sering dikatakan bahwa setiap aktiva mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Kas sendiri per definisi, merupakan aktiva yang paling likuid karena sudah berbentuk kas. Untuk aktiva-aktiva lain, likuiditas mempunyai dua dimensi, yaitu (1) waktu yang diperlukan untuk berubah menjadi kas, dan (2) tingkat kepastian yang menyangkut dengan rasio perubahan, atau harga, aktiva tersebut (Husnan, 1998: 436).

Menurut Munawir (2007:71) suatu koperasi atau badan usaha mempunyai posisi keuangan yang kuat apabila mampu:

1. Memenuhi kewajiban-kewajibannya tepat pada waktunya pada saat ditagih.
2. Memelihara modal kerja yang cukup untuk operasi yang normal (kewajiban keuangan terhadap pihak intern).
3. Membayar bunga dari deviden yang dibutuhkan.
4. Memelihara tingkat kredit yang menguntungkan.

Menganalisa posisi keuangan jangka pendek (likuiditas) suatu perusahaan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu (1) kita dapat melihat aktiva-aktiva perusahaan yang relatif likuid sifatnya dan membandingkannya dengan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat, dan (2) kita dapat melihat secepat apakah aktiva perusahaan yang likuid dapat diubah menjadi kas.

Aspek yang perlu diperhatikan sebelum menganalisis suatu likuiditas. Menurut PP No.9 tahun 1995 dalam (Ananingsih, 2007:17-18) aspek yang perlu diperhatikan adalah:

1. Penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
2. Rasio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun.

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas

Menurut Riyanto (2001:28) dalam mengukur tingkat likuiditas dengan menggunakan *current ratio* sebagai alat pengukurnya, maka tingkat likuiditas suatu perusahaan dapat dipertinggi dengan jalan sebagai berikut :

1. Dengan utang lancar (*current liabilities*) tertentu, diusahakan untuk menambah aktiva lancar (*current assets*).
2. Dengan aktiva lancar tertentu, diusahakan untuk mengurangi jumlah utang lancar.
3. Dengan mengurangi jumlah utang lancar bersama-sama dengan mengurangi aktiva lancar.

Sedangkan menurut Munawir (2007:73), *current ratio* yang terlalu tinggi menunjukkan kelebihan uang kas atau aktiva lancar lainnya dibandingkan dengan yang dibutuhkan sekarang atau tingkat likuiditas yang rendah dari pada aktiva lancar dan sebaliknya. Maka dari itu, dalam menganalisa likuiditas atau *current ratio* harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Distribusi atau proporsi dari pada aktiva lancar;
2. Data trend dari pada aktiva lancar dan hutang lancar, untuk jangka waktu 5 tahun atau lebih dari waktu yang lalu;
3. Syarat yang diberikan oleh kreditur kepada perusahaan dalam mengadakan pembelian maupun syarat kredit yang diberikan oleh perusahaan dalam menjual barangnya;

4. Present value (nilai sesungguhnya) dari aktiva lancar, sebab ada kemungkinan perusahaan mempunyai saldo piutang yang cukup besar tetapi piutang tersebut sudah lama terjadi dan sulit ditagih sehingga nilai realisasinya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan yang dilaporkan;
5. Kemungkinan perubahan nilai aktiva lancar misalnya kalau nilai persediaan nilai semakin turun (deflasi) maka aktiva lancar yang besar (terutama ditunjukkan dalam persediaan) maka tidak menjamin likuiditas perusahaan;
6. Perubahan persediaan dalam hubungannya dengan volume penjualan sekarang atau di masa yang akan datang, yang mungkin adanya over investment dalam persediaan;
7. Kebutuhan jumlah modal kerja di masa mendatang, makin besar kebutuhan modal kerja di masa yang akan datang maka dibutuhkan adanya ratio yang besar pula;
8. Tipe atau jenis perusahaan (perusahaan yang memproduksi sendiri barang yang dijual, perusahaan perdagangan atau perusahaan jasa).

Selain faktor-faktor diatas, likuiditas juga dapat dipengaruhi oleh pengendalian intern kas. Menurut Muslich (2000:99), persoalan pokok dalam manajemen arus kas adalah bagaimana perusahaan mempunyai cukup uang kas (likuid) untuk memenuhi kebutuhan pembayaran yang timbul. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan dua hal yaitu:

1. Perusahaan harus dapat memprediksi sacara tepat jumlah saldo kas untuk suatu periode tertentu.
2. Melakukan sinkronisasi secara tepat penerimaan dan pengeluaran kas.

Dari pendapat Muslich tersebut dapat dipahami bahwa dalam manajemen kas perlu dilakukan sinkronisasi secara tepat antara penerimaan dan pengeluaran kas. Sinkronisasi yang tepat dapat dilakukan dalam bentuk pengendalian intern penerimaan kas dan pengendalian intern pengeluaran kas agar tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan uang kas. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern kas juga dapat mempengaruhi tingkat likuiditas perusahaan.

Pengalaman menunjukkan bahwa semakin lama piutang belum dilunasi malampaui tanggal jatuh temponya, semakin kecil kemungkinan piutang dapat ditagih. Tingkat perputaran merupakan indikator umur piutang. Indikator ini terutama berguna saat membandingkan dengan taksiran tingkat perputaran yang dihitung menggunakan perjanjian kredit yang telah ditentukan. Likuiditas mengacu pada kecepatan konversi piutang menjadi kas. Tingkat perputaran piutang adalah ukuran kecepatan ini (Wild, Subramanyam dan Robert, 2005:197).

Dari sekian banyak faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas seperti yang dijelaskan di atas. Peneliti hanya akan mengambil dua

faktor sebagai variabel yang akan diteliti tingkat pengaruhnya terhadap likuiditas. Dua faktor tersebut yaitu pengendalian intern kas dan perputaran piutang.

2.1.3 Pengukuran dan Penilaian Likuiditas

Demikian bagi pimpinan koperasi, terutama bagi manajer keuangan, maupun bank atau para pemasok yang memberikan kredit kepada koperasi, mereka perlu sekali mengetahui kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban segeranya. Untuk mengukur atau menilai tingkat likuiditas suatu koperasi atau badan usaha dengan menggunakan rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah perbandingan yang digunakan badan usaha untuk menunjukkan tingkat kemudahan relatif suatu aktiva untuk segera dikonversikan ke dalam kas dengan sedikit atau tanpa penurunan nilai serta menunjukkan tingkat kepastian tentang jumlah kas yang dapat diperoleh guna menjamin pengembalian kewajiban jangka pendeknya bila jatuh tempo. Kondisi ini sangat penting bagi pihak luar koperasi, seperti kreditur dalam menentukan pemberian kredit terhadap suatu badan usaha atau dalam hal ini adalah koperasi.

Untuk mengukur dan menilai tingkat likuiditas suatu badan usaha atau perusahaan digunakan rasio yaitu:

1. Rasio Lancar (*current ratio*)

   Current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar dan digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka

pendeknya, dengan asumsi bahwa semua aktiva lancar dikonversikan ke dalam kas.

Riyanto (2001:*26*) menyatakan bahwa *current ratio* kurang dari 2:1 secara kasar dianggap kurang baik. Sebab apabila aktiva lancar turun misalnya sampai lebih dari 50%, maka aktiva lancar tidak cukup lagi untuk menutup utang lancarnya. Pedoman *current ratio* 2:1 sebenarnya didasarkan pada prinsip hati-hati. Dengan demikian, prinsip *current ratio* 200% bukanlah pedoman yang mutlak, artinya bahwa setiap perusahaan mempunyai rasio minimum yang berbeda-beda, tergantung besarnya rasio umum yang telah ditetapkan.

Current ratio menunjukkan tingkat keamanan (*margin of safety*) kreditur jangka pendek atau keamanan perusahaan untuk membayar utang-utang tersebut. Tetapi suatu perusahaan dengan *current ratio* yang tinggi belum tentu menjamin akan dapat dibayarnya utang perusahaan yang sudah jatuh tempo karena proporsi atau distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan, misalnya jumlah persediaan yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat penjualan yang akan datang sehingga tingkat perputaran persediaan rendah dan menunjukkan adanya *turn over investment* dalam persediaan tersebut atau adanya saldo piutang yang besar yang mungkin sulit untuk ditagih (Munawir, 2007:72).

Rasio lancar dapat dihitung sebagai berikut:

$$Current\ Ratio = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$$

2. *Acid Test Ratio* (*quick ratio*)

Acid test ratio menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dibayar dengan aktiva lancar yang lebih likuid dengan tidak memperhitungkan persediaan. Persediaan dirasa kurang likud karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisir menjadi uang kas dan sering mengalami fluktuasi harga. Apabila kita menggunakan *acid test ratio* untuk menentukan rasio likuiditas, maka suatu perusahaan yang mempunyai *acid test ratio* kurang dari 1:1 atau 100%, dianggap kurang baik likuiditasnya (Riyanto, 2001:28).

Acid test ratio dapat dihitung sebagai berikut:

$$\textit{Acid Test Ratio} = \frac{\text{Kas + surat berharga + piutang}}{\text{Kewajiban lancar}} \text{ X } 100\%$$

3. *Cash Ratio*

Cash ratio menunjukkan kemampuan untuk membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia. Piutang tidak selalu mudah ditagih, oleh karena itu cenderung untuk dikeluarkan dari perhitungan *cash ratio*. Dengan demikian apabila persediaan dan piutang dikeluarkan dari perhitungan maka tinggal kas di bank. Jadi perhitungannya diperoleh dengan membandingkan antara kas dengan utang jangka pendek. Standar normal *cash ratio* adalah 10 % (Kep.

Ment.Neg.Koperasi dan UKM:129/Kep/MKUKM/XI/2002) dalam (Sufiyanti,2007:39).

Cash Ratio dapat dihitung sebagai berikut:

$$\textit{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas+surat berharga}}{\text{Kewajiban lancar}} \text{ X } 100\%$$

2.2 Kas

2.2.1 Pengertian Kas

Menurut Baridwan (2004:85) kas merupakan alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Sedangkan menurut Stice, dkk (2004: 496) kas adalah aktiva lancar yang terdiri dari uang logam, uang kertas, dan unsur-unsur lain yang berfungsi sebagai alat pertukaran dan memberikan dasar untuk perhitungan akuntansi. Kas sebagai nilai uang kontan yang dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansiil, yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya (Indriyo, 2000 : 61).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kas merupakan alat pertukaran, atau pembayaran yang terdiri dari uang logam, uang kertas, dan unsur-unsur lain (logam dan kertas) yang dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansiil dan berfungsi sebagai alat pertukaran serta memberikan dasar untuk perhitungan akuntansi. Dalam neraca, kas merupakan aktiva yang paling likuid dalam arti sering berubah jumlahnya.

2.2.2 Aliran Kas

Perusahaan selalu membutuhkan kas dalam menjalankan usahanya, baik untuk membayar operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. Proses aliran kas yang terjadi dalam perusahaan berlangsung secara terus menerus sepanjang hidup perusahaan yang bersangkutan. Dari segi perputarannya, pola kas terdiri dari aliran kas masuk (*cash inflow*) dan aliran kas keluar (*cash out flow*).

Aliran kas masuk yang bersifat kontinyu yaitu penjualan tunai dan penerimaan piutang, dan penerimaan yang tidak kontinyu dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, penerimaan kredit dari bank, penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Demikian halnya dengan aliran kas keluar ada yang bersifat kontinyu seperti pembelian bahan mentah, pembayaran upah dan gaji. Aliran kas keluar yang tidak kontinyu misalnya pembayaran bunga, deviden, pajak penghasilan atau laba, pembelian aktiva tetap dan lain-lain.

2.3 Sistem Pengendalian Intern

2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2001: 163) adalah struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut IAI (2001: 319) dalam (Yadnyana, 2005) struktur pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan porsonel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya menurut Tawaf (1999:19) dalam (Desyanti dan Ratnadi, 2005) pengendalian intern meliputi kebijakan, susunan organisasi, serta semua cara-cara dan peraturan yang terkoordinasi yang dianut untuk mencapai tujuan oleh satuan usaha.

Pengendalian intern meliputi organisasi dan semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi dalam suatu perusahaan untuk mengamankan kekayaan, memelihara kecermatan dan sampai seberapa jauh dapat dipercayanya data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan (Tunggal, 1995: 1).

Pada dasarnya pengertian pengendalian intern mngutamakan tercapainya tujuan perusahaan. Sistem pengendalian intern yang baik sebagai jaminan dapat tercapainya tujuan dan wujud dari keberhasilan manajer dalam memimpin perusahaan. Sejauh mana data akuntansi

dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan.

2.3.2 Unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur dalam sistem pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi yang diperlukan agar sistem tersebut berjalan dengan efektif (Mulyadi, 2001: 164) terdiri dari:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

   Pemisahan tugas diperlukan untuk mengurangi kemungkinan bagi seseorang berada dalam posisi melakukan kekeliruan dan ketidakberesan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip:

   a. Harus dipisahkan fumsi-fungsi organisasi transaksi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.
   b. Tidak satupun transaksi yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi.

   Pemisahan fungsi merupakan dasar terciptanya sistem pengendalian intern, fungsi-fungsi harus dipisahkan; fungsi pengawasan, fungsi pencatatan dan fungsi penyimpanan.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

Di sisi lain transaksi harus dilaksanakan melalui prosedur yang telah ditetapkan termasuk pencatatan atas berbagai dokumen yang digambarkan adanya tindakan persiapan pemeriksaan dan persetujuan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

   Untuk menciptakan praktik yang sehat harus terdapat karyawan yang kompeten dan memiliki kemampuan atau latihan yang mendukung tugas mereka. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara yang dilaksanakan untuk menciptakan praktik yang sehat adalah :

   a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh pejabat yang berwenang.
   b. Pemeriksaan mendadak (*Surprised audit*).
   c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa campur tangan dari orang lain atau unit organisasi yang lain.
   d. Perputaran jabatan (*job rotation*).
   e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
   f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya.

g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas sistem pengendalian intern yang lain.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Keempat unsur pokok pengendalian intern di atas, unsur mutu karyawan merupakan unsur pengendalian yang paling penting. Karyawan yang jujur dan ahli bidangnya akan dapat melaksanakan pekerjaan yang efektif dan efisien. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya cara berikut dapat ditempuh :

a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya.

b. Pengembangan pendidikan karyawan sebelum menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaan.

Menurut Alvin A.Areus G James Kloebbeoke (1991) dalam (Tunggal, 1995:21), unsur-unsur pengendalian intern terdiri dari:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh dari manajemen puncak, direktur dan komisaris serta pemilik satu satuan usaha.

b. Sistem Akuntansi

Kegunaan sistem akuntansi satu satuan usaha untuk mengidentifikasikan, menggabungkan, mengklasifikasikan, mencatat dan melaporkan transaksi satu satuan usaha. Dan untuk pengelolaan akuntabilitas atas aktiva yang terkait.

c. Prosedur Pengendalian

Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, selain dari lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang dibuat manajemen untuk memenuhi tujuannya.

Pengendalian intern hanya dapat diimplementasikan dengan baik apabila koperasi mampu membangun elemen-elemen pengendalian yang memadai. Terdapat lima elemen pokok pengendalian intern yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penafsiran Resiko, (3) Informasi dan Komunikasi, (4) Aktivitas Pengendalian (5) Pemantauan (Dep Kop dan UKM, 2002: 170-190) dalam (Hastuti, 2006 :17).

2.3.3 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Tujuan utama sistem pengendalian intern yang efektif adalah membantu manajemen dalan mencapai tujuan perusahaan. Menurut Tunggal (1995:2) tujuan pengendalian intern adalah :

1. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi.

   Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji ketepatannya untuk melaksanakan operasi perusahaan. Berbagai macam data digunakan untuk mengambil keputusan yang penting.

2. Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya.

   Harta fisik perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau rusak tidak sengaja. Sistem pengendalian intern dibentuk untuk mencegah

ataupun menemukan harta yang hilang dan catatan pembukuan pada saat yang tepat.

3. Untuk menggalakkan efisiensi usaha.

   Pengendalian dalam suatu perusahaan dimaksudkan untuk menghindari pekerjaan-pekerjaan yang berganda terhadap penggunaan sumber-sumber yang tidak efisien.

4. Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan.

   Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian intern memberikan jaminan akan ditaatinya prosedur dan pereturan tersebut oleh perusahaan.

2.3.4 Sistem Pengendalian Intern Kas

Sistem pengendalian intern kas meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi berupa akses mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi dan efektivitaas penggunaan kas.

1. Pengendalian Intern Penerimaan Kas

   a. Pengendalian Intern Penerimaan Kas Dari Penjualan Tunai

      Penerimaan kas dari penerimaan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh

perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjulan tunai kenudian dicatat oleh perusahaan.

Unsur pengendalian intern yang harus ada dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai.

1) Organisasi

Unsur pokok pengendalian intern dalam merancang organisasi yang berkaitan dengan sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Fungsi penjualan harus terpisah dari kas

Fungsi penjualan yang merupakan fungsi operasi harus dipisahkan dari fungsi kas yang merupakan fungsi penyimpana. Pemisahan ini mengakibatkan setiap penerimaan kas dari penjualan tunai dilaksanakan oleh dua fungsi yang saling mengecek.

b) Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi

Berdasarkan unsur sistem pengendalian intern yang baik, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain: fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi.

c) Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakkan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi.

Dengan dilaksanakannya setiap transaksi penjualan tunai oleh berbagai fungsi tersebut akan tercipta adanya pengecekan intern pekerjaan setiap fungsi tersebut oleh fungsi lainnya.

2) Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan

a) Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai.

Transaksi penjualan tunai dimulai dengan diterbitkannya faktur penjualan tunai oleh fungsi penjualan. Faktur penjualan tunai harus diotorisasi oleh fungsi penjualan agar menjadi dokumen yang sahih, yang dapat dipakai sebagai dasar bagi fungsi penerimaan kas untuk menerima kas dari pembeli, dan menjadi perintah bagi fungsi pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli, setelah harga barang dibayar oleh pembeli tersebut, serta sebagai dokumen sumber untuk pencatatan dalam catatan akuntansi.

b) Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membubuhkan cap ”lunas” pada faktur penjualan tunai dan penempelkan pita register kas pada faktur tersebut.

Sebagai bukti bahwa fungsi penerimaan kas telah menerima kas dari pembeli, fungsi tersebut harus membubuhkan cap ”lunas” dan menempelkan pada register kas

pada faktur penjualan tunai. Dengan cap ”lunas” dan pita register kas tersebut dokumen faktur penjualan tunai dapat memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli.

c) Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit.

Otorisasi didapat merchant dengan cara memasukkan kartu kredit ke dalam alat tersebut sehingga terhindar dari ketidakbonafitan pemegang kartu kredit.

d) Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan tunai.

Pembubuhan cap ”sudah diserahkan” oleh fungsi pengiriman pada faktur penjualan tunai dapat dijadikan bukti telah diserahkannya barang kepada pembeli yang berhak. Dengan bukti ini fungsi akuntansi telah memperoleh bukti yang sahih untuk mencatat adanya transaksi penjualan tunai dengan mendebit rekening kas dan mengkredit rekening hasil penjualan dan persediaan barang.

e) Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokomen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.

Catatan akuntansi harus diisi informasi yang berasal dari dokumen sumber yang sahih (valid). Kesahihan dokumen sumber dibuktikan dengan dilampirkannya dokumen pendukung yang lengkap, yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

f) Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk itu.

Setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk mengubah catatan akuntansi tersebut. Sehabis karyawan tersebut memutakhirkan (memutakhirkan/ *up-date*) catatan akuntansi berdasarkan dokumen sumber, ia harus membubuhkan tanda tangan dan tanggal pada dokumen sumber sebagai bukti telah dilakukannya pengubahan data yang dicatat dalam catatan akuntansi pada tanggal tersebut.

3) Praktik yang Sehat

a) Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan.

Untuk menciptakan praktik yang sehat formulir penting yang digunakan dalam perusahaan harus bernomor urut tercetak dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan pada fungsi yang memiliki wewenang untuk menggunakan formulir tersebut yaitu fungsi penjualan.

b) Jumlah kas yang di terima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya.

Penyetoran segera seluruh jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank akan menjadikan kurnal kas perusahan dapat diuji ketelitian dan keandalannya dengan menggunakan informasi dari bank yang tercantum dalam rekening koran bank (*bank statement*).

c) Penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern.

Dalam perhitungan fisik kas dapat dilakukan dengan cara mencocokkan antara jumlah kas hasil hitungan dengan jumlah kas yang seharusnya ada menurut faktur penjualan tunai dan bukti penerimaan kas yang lain (Mulyadi, 2001: 471-474)

a. Pengendalian Intern Penerimaan Kas Dari Piutang

Sumber penerimaan kas suatu perusahan biasanya berasal dari pelunasan piutang dari debitur, karena sebagian besar produk perusahaan tersebut dijual melalui penjualan kredit.

Unsur pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas dari piutang adalah:

1) Organisasi

a) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas.

Dalam hal ini, untuk menciptakan *internal check* antara fungsi penerimaan kas dan fungsi penagihan yang bertanggungjawab untuk menagih dan menerima cek uang atau uang tunai dari debitur.

b) Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.

Pemisahan fungsi penerimaan kas dari fungsi akuntansi dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan pencurian dan penyalahgunaan catatan akuntansi oleh bagian akuntan.

2) Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan

a) Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindahanbukuan (*giro bilyet*).

Dengan cek ats nama dan *giro bilyet*, pembayaran yang dilakukan oleh debitur akan terjamin masuknya ke dalam rekening giro perusahaan. Serta untuk menghindari penerimaan debitur ke tangan pribadi karyawan.

b) Fungsi penagih melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi.

Fungsi penagihan hanya melakukan penagihan atas dasar daftar piutang yang telah jatuh tempo yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Dengan demikian fungsi penagihan tidak mungkin melakukan penagihan piutang dari debitur, kemudian menggunakan uang hasil penagihan tersebut untuk kepentingan pribadinya untuk jangka waktu tertentu.

c) Perkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (bagian piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur.

Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar yang handal untuk mengurangi piutang adalah surat pemberitahuan (*remittance advice*) yang diterima dari debitur bersamaan dengan cek.

3) Praktik yang Sehat

a) Hasil penghitungan kas direkam dalam berita acara penghitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera.

Fungsi pemeriksa intern melakukan perhitungan kas secara periodik dan hasil perhitungan tersebut direkam dalam suatu dokumen yang disebut dengan berita acara perhitungan kas dan setelah dihitung maka kas tersebut segera disetor ke bank sesuai jumlah perhitungan.

b) Para penagih dan kasir harus diasuransikan (*fidelity bond insurance*).

Perusahaan perlu melakukan asuransi untuk menghindari kemungkinan adanya kecurangan dan penyalahgunaan oleh karyawan bagian kasa dan penagih yang berhubungan langsung dengan uang.

c) Kas dalam perjalanan (baik yang ada di tangan bagian kasa maupun di bagian tangan penagih perusahaan) harus diasuransikan (*cash in safe dan cash in transit insurance*).

Untuk melindungi kekayaan perusahaan berupa uang tunai dan uang dalam perjalanan, perusahaan menutup *cash in safe* dan *cash in transit* (Mulyadi, 2001: 491-492).

2. Pengendalian Intern Pengeluaran Kas

a. Pengendalian Intern Pengeluaran Kas dengan Cek

Pengeluaran kas dengan cek memiliki kebaikan ditinjau dari pengendalian intern berikut ini:

1) Dengan digunakan cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek.

2) Dilibatkannya pihak luar, dalam hal ini bank. Dengan digunakan cek pada setiap pengeluaran kas, transaksi pengeluaran kas direkam oleh bank yang secara periodik mengirimkan rekening koran (*bank statement*) kepada perusahaan nasabahnya.

3) Jika sistem perbankan mengembalikan *cancelled check* kepada *check issuer* pengeluaran kas cek memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang mengeluarkan cek.

b. Pengendalian Intern Pengeluaran Kas dengan Dana Kas Kecil

Penyelenggaraan dana kas kecil untuk memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara: sistem saldo fluktuasi (*fluctuating fund balance*) dan *imprest sistem.* Dalam sistem saldo berfluktuasi penyelenggaraan dana kas kecil dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1) Pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebet rekening dana kas kecil.
2) Pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit rekening dana kas kecil, sehingga setiap saat saldo rekening ini berfluktuasi.
3) Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebet dana kas kecil. Dalam sistem ini, saldo rekening dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Dana kas kecil dengan menggunakan sistem saldo berfluktuasi, catatan kas perusahaan dapat direkonsiliasikan dengan catatan bank, oleh karena itu rekonsiliasi bank bukan merupakan alat pengendalian bagi catatan kas perusahaan.

Penyelenggaraan dana kas kecil dengan *imprest sistem*, dilakukan sebagai berikut:

1) Pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebet rekening dana kas kecil.
2) Pengeluaran dengan dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal (sehingga tidak mengkredit rekening dana kas kecil).
3) Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil.

Dengan demikian pengawasan terhadap dana kas kecil mudah dilakukan, yaitu dengan secara periodik atau secara mendadak menghitung dana kas kecil.

Unsur pengendalian intern dalam pengeluaran kas adalah:

1) Organisasi
   a) Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akutansi.

      Unsur pengendalian intern mengharuskan pemisahan fungsi penyimpanan antara fungsi penyimpanan yang dipegang oleh bagian kasa dan fungsi akuntansinya, kas dipegang bagian jurnal yang menyelenggarakan register cek atas jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas supaya data akuntansi yang dicatat dapat dijamin keandalannya sehingga fungsi akuntansi dapat berfungsi juga sebagai pengawas semua perpindahan kas yang disimpan oleh fungsi penyimpanan kas.

b) Transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilakanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi yang lain.

Dalam pelaksanaan transaksi kas yang meliputi transaksi penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan kas dilakukan oleh lebih dari satu orang, agar kas perusahaan terjamin keamanannya dan data akuntansinya dijamin ketelitiannya serta keandalannya.

2) Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan

a) Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang.

Setiap transaksi pengeluaran kas diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dengan dokumen dan catatan akuntansi yang termutakhir.

b) Pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Jika terjadi pembukuan dan penutupan rekening giro perusahaan di bank tanpa otorisasi dari pejabat yang berwenang maka akan terbuka kemungkinan penyaluran penerimaan maupun pengeluaran kas perusahaan.

c) Pencatatan dalam jurnal pengeluran kas (atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek) harus didasarkan atas bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang

berwenang dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.

Sistem pengendalian intern mengharuskan setiap pencatatan ke dalam pencatatan akuntansi didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap, yang telah diproses melalui sistem otorisasi yang berlaku.

3) Praktik yang Sehat

a) Saldo kas yang ada ditangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya.

Untuk menghindari kemungkinan adanya pencurian dan penggunaan yang tidak semestinya dapat dengan caramenyimpan kas dalam almari besi dan menempatkan kasir pada tempat terpisah.

b) Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap ”lunas” oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan.

Dalam transaksi pengeluaran kas, bukti kas keluar dibuat oleh fungsi akuntansi (bagian utang) setelah dokumem pendukungnya lengkap. Bukti kas keluar ini merupakan dokumen perintah pengeluaran kas dari pejabat yang berwenang kepada fungsi keuangan. Oleh karena itu, untuk menghindari penggunaan dokumen pendukunglebih dari satu kali sebagai dasar pembuatan

bukti kas keluar, fungsi keuangan harus membubuhkan cap ”lunas” pada bukti kas keluar beserta dokumen pendukungya, segera setelah pengiriman cek kepada kreditur.

c) Penggunaan rekening koran bank (*bank statement*), yang merupakan informasi dari pihak ketiga, untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksa intern (*internal audit function*) yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas.

    Informasi yang diterima secara periodik dari pihak ketiga dalam hal ini adalah bank berupa rekening koran, dipergunakan untuk mengecek ketelitian register cek dan jurnal penerimaan, serta pengeluaran kas yang disebut dengan rekonsiliasi bank.

d) Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindah bukuan.

    Dalam hal ini, pembayaran cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindahbukuan dilakukan untuk memastikan bahwa kas yang dikeluarkan perusahaan sampai pada alamat yang dituju.

e) Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil, yang akuntansinya diselenggarakan dengan *imprest sistem*.

Apabila perusahaan melakukan pengeluaran dalam jumlah kecil sebaiknya pengeluaran dilakukan melalui dana kas kecil dengan metode *imprest sistem*.

f) Secara periodik diadakan pencocokkan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi.

Perhitungan fisik atas uang kas dilakukan terhadap jumlah kas yang belum disetor ke bank dan saldo dana kas kecil yang ada ditangan perusahaan pada saat tertentu dan dilakukan secara periodik untuk mencegah karyawan melakukan penyelewengan terhadap penggunaan kas.

g) Kas yang ada di tangan (*cash in safe*) dan kas yang ada di perjalanan (*cash in transit*) diasuransikan dari kerugian.

Perusahaan sebaiknya mengasuransikan kas yang ada ditangan dan kas yang ada diperjalanan jika jumlahnya relatif besar, karena diperkirakan akan timbul kerugian besar akibat terjadinya perampokan atau pencurian.

h) Kasir diasuransikan (*fidelity bond insurence*).

Kasir diasuransikan guna menjamin penggantian atas kerugian yang diakibatkan adanya penyelewangan yang dialkukan oleh kasir.

i) Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan (misalnya mesin register kas, almari besi, dan strong room).

Pada umumnya setiap perusahaan menempatkan bagian kasa di suatu ruangan yang tidak semua pihak yang tidak berkepentingan dapat melakukan akses ke dalamnya, tanpa ijin pihak yang berwenang.

j) Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa.

Setiap nomor cek wajib dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa, sebab bagian ini bertugas untuk megisi cek (berdasar bukti kas keluar yang diterbitkan oleh fungsi pencatat uang) dan meminta otorisasi atas cek tersebut (Mulyadi, 2001: 510-521)

2.4 Piutang

2.4.1 Pengertian Piutang

Piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan kredit. Untuk mengendaliakan piutang, perusahaan perlu menetapkan kebijakan kreditnya (Husnan,1998:468). Menurut Baridwan (2004: 123) piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang atau jasa-jasa pihak lain. Sedangkan menurut Muslich (2003: 109) piutang perusahaan pada umumnya merupakan jumlah terbesar dalam aktiva lancar dan merupakan bagian yang besar dari *asset* perusahaan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa piutang adalah elemen aktiva lancar yang timbul atas penjualan barang dan jasa,

pemberian pinjaman yang membentuk hubungan antara pihak satu dengan pihak lain.

Menurut Riyanto (2001: 85-86) besar kecilnya piutang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1) Volume penjualan. Makin besar jumlah penjualan kredit dari keseluruhan penjualan akan memperbesar jumlah piutang dan sebaliknya semakin kecil jumlah penjualan kredit dari keseluruhan piutang akan memperkecil jumlah piutang.
2) Syarat pembayaran bagi penjulan kredit. Semakin panjang batas waktu pembayaran kredit berarti semakin besar jumlah piutangnya dan sebaliknya semakin pendek batas waktu pembayaran kredit berarti semakin kecil besarnya jumlah piutang.
3) Ketentuan mengenai batas volume penjualan kredit. Apabila batas maksimal volume penjualan kredit ditetapkan dalam jumlah yang relatif besar maka besarnya piutang juga akan semakin besar.
4) Kebiasaan membayar para pelanggan kredit. Apabila kebiasaan membayar para pelanggan dari penjualan kredit mundur dari waktu yang dipersyaratkan maka besarnya jumlah piutang relatif besar.
5) Kegiatan penagihan piutang dari pihak perusahaan. Apabila kegiatan penagihan piutang dari perusahaan bersifat aktif dan pelanggan melunasinya maka besarnya jumalh piutang bersifat pasif maka besarnya jumlah piutang relatif besar.

2.4.2 Perputaran piutang

Rasio ini menginformasikan berapa kali piutang diputar (diubah menjadi kas) dalam setahun. Semakin tinggi perputaran, semakin singkat waktu antara penjualan dan penagihan kas. Jika angka penjulan kredit untuk periode tersebut tidak tersedia maka harus digunakan angka penjualan total (Horned dan Wachowicz, 1997:140) dalam (Rakhmawati, 2006:24).

Periode perputaran piutang juga dipengaruhi oleh panjang pendeknya ketentuan waktu yang disyaratkan dalam syarat pembayarannya. Semakin lama syarat pembayaran kredit, berarti semakin lama terikatnya modal kerja tersebut dalam piutang dan menandakan semakin kecil tingkat perputaran piuatang dalam satu periode (Riyanto, 2001:90). Perputaran piutang yang tinggi menunjukkan cepatnya piutang dilunasi oleh debitur. Makin tinggi rasio perputaran piutang menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah, sebaliknya kalau rasio semakin rendah berarti ada *over investment* dalam piutang sehingga memerlukan analisa lebih lanjut, mungkin karena bagian kredit dan penagihan bekerja tida k efektif atau mungkin ada perubahan dalam kebijaksanaan pemberian kredit. Selain itu cepatnya piutang dilunasi menjadi kas berarti kas akan dapat digunakan kembali serta dapat memenuhi kewajiban finansiil bila jatuh tempo.

Tingkat perputaran piutang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat perputaran piutang} = \frac{\text{Penjualan netto kredit}}{\text{Rata-rata piutang}} = \quad \text{kali}$$

Menurut Peraturan Menteri Negera Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.22/PER/M.KUKM/VI/2007 menyatakan bahwa untuk menggambarkan kondisi aktivitas dalam koperasi digunakan rasio perputaran piutang, yang rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio perputaran piutang} = \frac{\text{Jumlah penjualan kredit}}{\text{Jumlah piutang rata-rata}} \times 100\%$$

Tabel 2.1

Standar Rasio Perputaran Piutang

No.	Standar	Nilai	Kriteria
a.	>100%	5	Sangat ideal
b.	75% - 100%	4	Ideal
c.	50% - 75%	3	Cukup ideal
d.	25% - 50%	2	Kurang ideal
e.	< 25%	1	Sangat tidak ideal

Sumber: Per.Men.Neg.Koperasi dan UKM No.22 / PER / M.KUKM / VI / 2007

2.5 Kerangka Berpikir

Suatu badan usaha koperasi dalam kehidupan sehari-hari selalu membutuhkan dana, dalam hal ini adalah kas. Kas sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Badan usaha koperasi dikatakan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi jika ada sejumlah

kas yang memadai didalamnya, sehingga suatu saat membutuhkan dana, koperasi tersebut dapat segera memenuhi kewajibannya karena adanya kas yang tersedia. Karena pentingnya kas bagi berkelanjutan suatu koperasi, maka perlu pengelolaan atau manajemen kas.

Manajemen kas pelu dilakukan untuk menjamin efektivitas ketersediaan kas, kerena kurang dapat diperkirakannya antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Proses aliran kas akan berlangsung terus menerus selama hidupnya perusahaan. Aliran kas masuk dan keluar kurang dapat diperkirakan, dan tingkat kepastiannya berbeda-beda, diantara berbagai perusahaan dan industri. Karena itu, perlu penyimpanan uang kas sebagai cadangan untuk menghadapi fluktuasi arus kas masuk dan keluar yang bersifat acak dan tidak terduga. Perusahaan mempunyai kas dalam jumlah cukup besar mungkin akan terhindar dari kesulitan keuangan. Tetapi jumlah kas yang berlebihan dapat menyebabkan nilai perusahaan berkurang karena *opportunity revenue* yang hilang. Menyimpan kas yang terlampau kecil menyebabkan meningkatkannya kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan menyimpan kas yang terlampau besar, perusahaan kehilangan peluang untuk melakukan investasi yang menghasilkan pendapatan, namun telah meminimumkan terjadinya kesulitan keuangan.

Kas sebagai salah satu modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Makin besar jumlah kas yang ada dalam perusahaan berarti semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Ini berarti bahwa perusahaan mempunyai risiko kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Tetapi ini

tidak berarti bahwa perusahaan harus mempertahankan persediaan kas yang besar, karena semakin besar kas yang menganggur maka akan memperkecil profitabilitas. Sebaliknya kalau perusahaan hanya mengejar profitabilitas saja maka akan menempatkan perusahaan dalam keadaan illikuid apabila sewaktu-waktu ada tagihan (Riyanto, 2001:94).

Menurut Muslich (2000:99), persoalan pokok dalam manajemen arus kas bagaimana perusahaan mempunyai cukup uang kas untuk memenuhi kebutuhan pembayaran yang timbul. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan dua hal yaitu:

1. Perusahaan harus dapat memprediksi sacara tepat jumlah saldo kas untuk suatu periode tertentu.
2. Melakukan sinkronisasi secara tepat penerimaan dan pengeluaran kas.

Dari pendapat Muslich tersebut dapat dipahami bahwa dalam manajemen kas perlu dilakukan sinkronisasi secara tepat antara penerimaan dan pengeluaran kas. Sinkronisasi yang tepat dapat dilakukan dalam bentuk pengendalian intern penerimaan kas dan pengendalian intern pengeluaran kas.

Selain pengendalian intern kas, likuiditas juga didukung oleh piutang sebagai salah satu elemen modal kerja. Dalam rangka usaha untuk memperbesar volume penjualannya kebanyakan perusahaan atau koperasi menjual produknya dengan kredit. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang langganan, dan barulah kemudian pada hari jatuh temponya terjadi aliran kas masuk *(cash flow)* yang

berasal dari pengumpulan piutang tersebut. Dengan demikian, maka piutang merupakan elemen modal kerja yang juga selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus. Dalam keadaan yang normal dan di mana tingkat penjualan pada umumnya dilakukan dengan kredit, piutang mempunyai tingkat likuiditas dibawah kas, karena perputaran dari piutang ke kas membutuhkan satu langkah saja. Tingkat perputaran piutang adalah kecepatan pelunasan piutang menjadi kas kembali. Tingkat perputaran piutang yang tinggi menunjukkan cepatnya dan terikat dalam piutang dengan kata lain cepatnya piutang dilunasi oleh debitur. Makin tinggi tingkat perputaran piutang maka makin cepat pula piutang menjadi kas. Selain itu, cepatnya piutang dilunasi menjadi kas berarti kas akan dapat digunakan kembali dan likuiditas yang baik akan dapat terpenuhi serta resiko kerugian piutang dapat diminimalkan.

Jadi, dengan adanya manajemen kas yang efektif dan cepatnya tingkat perputaran piutang maka akan menjamin ketersediaan kas yang cukup. Manajemen kas yang efektif tercipta dari unsur pengendalian intern kas yang terdiri dari struktur organisasi, sistem otorisasi, praktek yang sehat melalui bank serta kas kecil sistem dana tetap baik dalam pengendalian intern penerimaan kas maupun pengendalian intern pengeluaran kas. Sedangkan Makin tinggi perputaran piutang maka makin cepat pula piutang menjadi kas berarti kas dapat digunakan kembali. Dengan demikian pengendalian intern kas yang efektif dan perputaran piutang menjamin likuiditas perusahaan atau badan usaha.

Berdasarkan uraian kerangka berpikir diatas dapat digunakan model penelitian sebagai berikut:

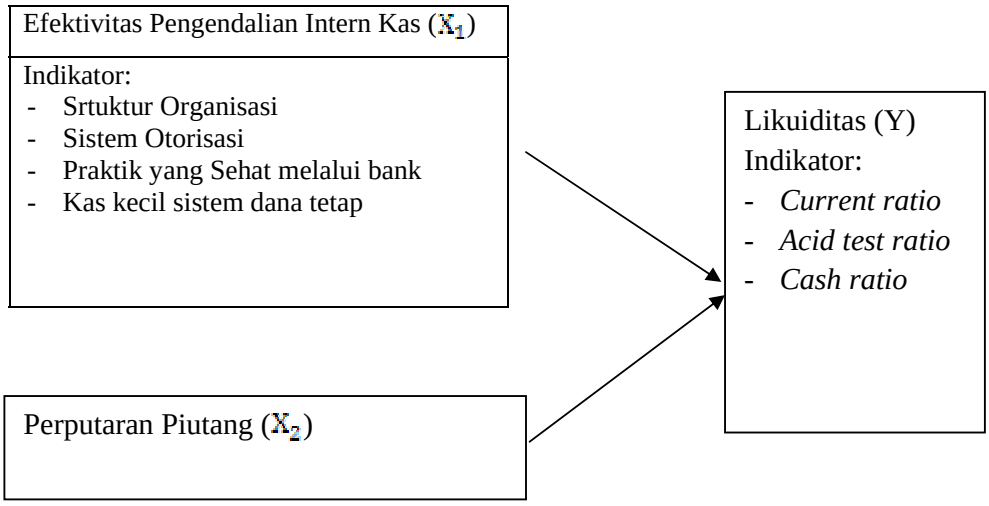

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir

2.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: ”Ada pengaruh efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap likuiditas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kendal”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif deskriptif karena penelitian ini lebih berdasarkan data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang kokoh. Dimana hasil data tersebut akan diuraikan sifat atau karakteristik suatu fenomena tertentu sehingga mencapai suatu kesimpulan yang dibutuhkan.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan kesuluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang telah berstatus badan hukum dan menjadi anggota Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) di Kabupaten Kendal yang berjumlah 85 koperasi.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu. Dengan karakteristik sampel sebagai berikut:

1. KPRI yang aktif mengikuti kegiatan dari PKPRI dan dibawah pembinaan dari Dinas Koperasi.
2. KPRI yang telah melaksanakan RAT tutup buku 2007 dengan tepat waktu.
3. KPRI yang mempunyai unit usaha simpan pinjam dan unit usaha pertokoan.

Sehingga di dapat sampel dengan jumlah 30 KPRI yang memenuhi karakteristik diatas.

Tabel 3.1

Sampel Penelitian

No	Nama KPRI	Dinas/ Kantor
1.	KPRI Keluarga	UPTD DISDIKPORA Kec. Patebon
2.	KPRI Bina Sejahtera	SMK Negeri 1 Kendal
3.	KPRI KPPDK PN Kendal	Pengadilan Negeri Kendal
4.	KPRI Wiyata Tama	SMP Negeri 3 Patebon
5.	KPRI Tri Karya	Ex Kawedanan Kaliwungu
6.	KPRI Kalimasadha	SMP Negeri 3 Kendal
7.	KPRI Rukun Makmur	KUA Kec. Weleri
8.	KPRI Dwija Jaya	P & K Kec. Singorojo
9.	KPRI Dwija Karya	P & K Kec. Limbangan
10	KPRI Jaya Dwija	P & K Kec. Patean
11.	KPRI Fajar Baru	P & K Kec. Sukorejo
12.	KPRI Karya Tama	P & K Kec. Plantungan
13.	KPRI Warga Abhyaksa	Kejaksaan Negeri Kendal
14.	KPRI Rukun	DPKD Kab. Kendal
15.	KPRI Margo Mulyo	P & K Kec. Kaliwungu
16.	KPRI Kencana	BKKBCS Kendal
17.	KPRI Taruna Sari	Dinas Pertanian
18.	KPRI Eka Karya	Pemda Kab. Kendal
19.	KPRI Wahana	P & K Kec. Cepiring & Kangkung
20.	KPRI Hikmah	Dep. Agama Kendal
21.	KPRI Bina Warga	P & K Kec. Brangsong
22.	KPRI Karya Husada	Dinas Kesehatan Kendal
23.	KPRI Bakti Sejahtera	DPU Kab. Kendal
24.	KPRI Adil	KUA Kec. Kaliwungu
25.	KPRI Subur	P & K Kec. Pegandon
26.	KPRI Sejahtera	P & K Kec. Kendal
27.	KPRI Mekar Tirta	DPU Pengairan Kendal

No	Nama KPRI	Dinas/ Kantor
28.	KPRI KPPDK LP Kendal	LP Kendal
29.	KPRI Bakti Praja	Ex Kawedanan Boja
30	KPRI Kompak	Pengadilan Agama Kendal

Sumber: PKPRI Kab. Kendal

3.3 Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Variabel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas

   Variabel bebas atau *independent variabel* merupakan variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat) atau variabel yang mempengaruhi Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang.

   a. Efektivitas pengendalian intern kas (X_1)

      Bentuk pengelolaan kas berupa pengendalian intern penerimaan kas dan pengendalian intern pengeluaran kas.

      Indikator:

      - Struktur organisasi
      - Sistem otorisasi
      - Praktik yang sehat melalui bank
      - Kas kecil sistem dana tetap

b. Perputaran piutang (X_2)

Pengukuran rasio perputaran piutang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio perputaran piutang} = \frac{\text{Jumlah penjualan kredit}}{\text{Jumlah piutang rata-rata}} \times 100\%$$

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat atau *dependent variabel* merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Dengan kata lain, variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam penelitian atau yang sering kita sebut dengan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah likuiditas. Likuiditas dalam penelitian ini adalah kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang segera dipenuhi, dengan indikator:

a. Current Ratio

Untuk mengkategorikan tingkat likuiditas yang dinilai menggunakan *current ratio* pada KPRI digunakan Pedoman Pemeringkatan Koperasi oleh Departemen Koperasi dan UKM tahun 2007 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Standar Rasio Likuiditas

Likuiditas	Standar	Nilai	Kriteria
Current Ratio	175% - 200%	5	Sangat ideal
	150% - 175%	4	Ideal
	125% - 150%	3	Cukup ideal
	100% - 125%	2	Kurang ideal
	< 100% - > 200%	1	Sangat tidak ideal

Sumber: Per.Men.Neg.Koperasi dan UKM No.22/ PER / M.KUKM / VI / 2007

Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan rata-rata KPRI yang dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan data hasil perhitungan *current ratio,* tidak menggunakan Pedoman Pemeringkatan Koperasi oleh Departemen Koperasi dan UKM tahun 2007 karena *current ratio* yang tidak bersifat linier dan selalu berubah sewaktu-waktu. Pengkategorian rata-rata KPRI dicari dengan menentukan panjang kelas interval (p) yaitu sebagai berikut :

$$P = \frac{data\ terbesar - data\ terkecil}{banyak\ kelas}$$

(Sudjana, 2001: 47)

b. Acid Test Ratio

Mengkategorikan tingkat likuiditas yang dinilai dengan *acid test ratio*, peneliti membuat pedoman pengkategorian sendiri yang disebut sebagai rata-rata KPRI karena tidak adanya pedoman khusus yang diterapkan dalam KPRI. Rata-rata KPRI dibuat setelah memperoleh

hasil perhitungan *acid test ratio*. Pengkategorian rata-rata KPRI dicari dengan menggunakan cara yang sama seperti *current ratio*.

c. Cash Ratio

Pengkategorian tingkat likuiditas yang dinilai dengan *cash ratio*, meggunakan cara yang sama seperti pengkategorian *curent ratio* dan *acid test ratio* yaitu menggunakan rata-rata KPRI karena tidak ada pedoman khusus yang diterapkan dalam KPRI.

Tabel 3.3

Definisi Operasional Variabel Penelitian

No.	Nama Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala
1.	Likuiditas (Y)	Kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang segera dipenuhi.	1. *Current Ratio* $\frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$ 2. *Acid Test Ratio (quick ratio)* $\frac{\text{kas + S. Berharga + piutang}}{\text{Kewajiban lancar}}$ x10 0% 3. *Cash Ratio* $\frac{\text{Kas+surat berharga}}{\text{Kewajiban lancar}}$x100%	Rasio
2.	Efektivitas pengendalian intern kas (X_1)	Meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi berupa akses mengecek keteitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi dan efektivitaas penggunaan kas.	Menggunakan angket, dengan indikator : 1. Struktur organisasi 2. Sistem otorisasi 3. Praktik yang sehat melalui bank 4. Kas kecil sistem dana tetap	Interval

No.	Nama Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala
3	Perputaran Piutang (X_2)	Tingkat perputaran piutang yang tinggi menunjukkan cepatnya piutang dilunasi oleh debitur.	Rasio perputaran piutang = $\frac{\text{Jumlah penjualan kredit}}{\text{Jumlah piutang rata-rata}}$ x 100%	Rasio

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lainnya misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar, 2001:69). Data yang digunakan adalah data tentang naraca keuangan dari KPRI di Kabupaten Kendal sebagai data sekunder dan pengisian kuesioner sebagai data primer.

3.5 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk

mengumpulkan dokumen penting terutama dokumen-dokumen berupa catatan laporan keuangan pada KPRI sebagai sampel penelitian pada tahun 2007.

2. Metode Angket atau Kuesioner

Metode angket atau kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Metode angket dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang berkaitan langsung dengan variabel X yaitu pengendalian intern kas. Metode angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner tertutup yaitu jawabannya sudah disediakan sehingga responden tinggal memilih. Maka dalam penilitian ini akan menggunakan *check list*, yaitu sebuah daftar, dimana tinggal membubuhkan tanda *check* (√) pada jawaban yang sesuai.

Adapun peneliti menggunakan check list adalah sebagai berikut:

1. Tidak memerlukan hadirnya peneliti.
2. Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden.
3. Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-masing dan menurut waktu senggang responden.
4. Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas jujur dan tidak malu-malu dalam menjawab.
5. Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi pertanyaan yang benar-benar sama.

3.6 Teknik Pengukuran Validitas dan Reliabilitas Instrumen

3.6.1 Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang di inginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini validitas digunakan untuk menguji instrumen berupa angket pengendalian intern kas.

Berdasarkan cara pengujiannya validitas dibagi dua yaitu validitas eksternal dan validitas internal. Dalam penelitian ini pengujian dengan menggunakan validitas internal dengan cara mengkorelasikan skor-skor yang ada pada butir dengan skor total. Untuk mencapai validitas butir soal tes. Rumus korelasi yang digunakan adalah rumus korelasi *product moment* oleh pearson.

Rumus : dengan angka kasar

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X^2)\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y^2)\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Korelasi variabel XY

$\sum X$ = Jumlah skor butir

$\sum X^2$ = Jumlah kuadrat skor

$\sum Y$ = Jumlah skor total

$\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat skor total

N = Jumlah responden

(Arikunto, 2006:170)

Hasil uji coba terhadap 20 KPRI di luar sampel diperoleh simpulan bahwa jnstrumen tersebut valid dimana nilai r_{xy} lebih besar dari pada r_{tabel} pada taraf signifikan 5% yaitu 0,444. Lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran dan terangkum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Hasil Uji Coba Angket

No Angket	r_{xy}	r_{tabel}	Kriteria	Indikator
1	0,589	0,444	Valid	Stuktur Organisasi
2	0,624	0,444	Valid	
3	0,485	0,444	Valid	
4	0,686	0,444	Valid	
5	0,567	0,444	Valid	Sistem Otorisasi
6	0,658	0,444	Valid	
7	0,637	0,444	Valid	
8	0,634	0,444	Valid	
9	0,621	0,444	Valid	
10	0,666	0,444	Valid	
11	0,558	0,444	Valid	
12	0,498	0,444	Valid	
13	0,685	0,444	Valid	
14	0,739	0,444	Valid	Praktek Sehat Melalui Bank
15	0,455	0,444	Valid	
16	0,624	0,444	Valid	
17	0,695	0,444	Valid	
18	0,548	0,444	Valid	
19	0,742	0,444	Valid	
20	0,695	0,444	Valid	
21	0,624	0,444	Valid	
22	0,700	0,444	Valid	
23	0,482	0,444	Valid	
24	0,665	0,444	Valid	
25	0,697	0,444	Valid	
26	0,526	0,444	Valid	

No Angket	r_{xy}	r_{tabel}	Kriteria	Indikator
27	0,787	0,444	Valid	Kas Kecil Sistem
28	0,452	0,444	Valid	Dana Tetap
29	0,462	0,444	Valid	

Sumber : Data diolah

3.6.2 Reliabilitas

Reliabilitas merupakan sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabel menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan.

Dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas internal karena menganalisis data dari satu kali hasil pengetasan. Untuk menggunakan reliabel instrumen digunakan rumus *Alpha* sebagai berikut:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{(k-1)}\right)\left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2}\right)$$

r_{11} = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians butir

σ_t^2 = varians total

(Arikunto, 2006:195)

Dari hasil uji coba yang telah dilakukan terhadap 20 KPRI dan setelah dianalisis dengan rumus *alpha* diperoleh angka berikut:

Tabel 3.5 Uji Reliabelitas Variabel

No	Variabel	r_{alpha}	r_{tabel}	Keterangan
1.	Efektivitas Pengendalian intern kas	0,959	0,444	Reliabel

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa kriteria tersebut di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel diperoleh nilai r_{alpha} lebih besar dari nilai r_{tabel}. Dengan demikian hasil uji reliabelitas terhadap keseluruhan variabel adalah reliabel.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif Persentase

Analisis deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk melihat sejauhmana variabel yang telah diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Metode ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis data mengenai variabel X_1 yang ada dalam penelitian ini, yaitu tingkat efektivitas pengendalian intern kas KPRI di Kabupaten Kendal. Variabel-variabel tersebut terdiri dari beberapa indikator yang sangat mendukung dan kemudian indikator tersebut dikembangkan menjadi instrumen (angket).

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan analisis tersebut adalah:

a. Membuat tabel distribusi jawaban angket.

b. Menentukan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden.

c. Membuat tabulasi data.

d. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

% = tingkat keberhasilan yang dicapai

n = nilai yang diperoleh (skor hasil)

N = jumlah seluruh skor atau nilai (skor ideal yang harus dicapai)

Hasil perhitungan dari rumus tersebut di atas digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas variabel penelitian sebagai berikut :

a. Jumlah responden = 30

b. Jumlah item check list = 29

c. Persentase maksimal $= \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$

d. Persentase minimal $= \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$

e. Penentuan kriteria = 5 kriteria

f. Rentang persentase = 100% - 20% = 80%

g. Interval kelas persentase = 80% : 5 = 16%

h. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengendalian intern kas maka peneliti menetapkan kriteria, yaitu sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif dan tidak efektif.

Tabel 3.6

Kriteria Deskriptif Presentase

No.	Rentang Persentase	Skor	Kriteria
1	84,00% - 100%	5	Sangat Efektif
2	68,00% - 83,99%	4	Efektif
3	52,00% - 67,99%	3	Cukup Efektif
4	36,00% - 51,99%	2	Kurang Efektif
5	20,00% - 35,99%	1	Tidak Efektif

3.7.2 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk meyakinkan bahwa variabel yang dibandingkan rata-rata mengikuti sebaran atau distribusi normal. Uji normalitas juga bertujuan untuk menguji apakah model statistik variabel-variabel penelitian berdistribusi normal/tidak normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal/mendekati normal. Pada penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah *one sampel Kolmogorov-Smirnov test*, yaitu pengujian yang dilakukan dengan membandingkan signifikan hasil uji dengan taraf signifikansinya ($\alpha =$ 0,05), jika hasil uji lebih besar dari taraf signifikansi maka data yang diuji berdistribusi normal. Sebaliknya jika hasil uji lebih kecil dari taraf signifikansi maka data yang diuji tidak berdistribusi normal. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Normalitas data penelitian yang diuji akan menentukan alat uji yang digunakan. Jika data penelitian

yang diuji berdistribusi normal, maka alat uji yang digunakan adalah alat uji parametrik. Sebaliknya jika data tidak berdistribusi normal maka pengujian dilakukan dengan menggunakan alat uji non parametrik.

Untuk menguji data yang dianalisa berdistribusi normal atau tidak, peneliti menggunakan program SPSS dengan uji regresi Linier.

Tabel 3.7

Pengujian Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Efektivitas Pengendalian Intern Kas	Perputaran Piutang	Current Ratio	Acid Test Ratio	Cash Ratio
N		30	30	30	30	30
Normal Parameters(a,b)	Mean	97,6667	35,5135	414,3303	393,3877	22,5867
	Std. Deviation	12,94906	29,60359	165,51084	178,71117	25,42038
Most Extreme Differences	Absolute	,183	,167	,175	,157	,238
	Positive	,183	,167	,175	,157	,238
	Negative	-,166	-,128	-,095	-,098	-,188
Kolmogorov-Smirnov Z		1,002	,913	,959	,859	1,304
Asymp. Sig. (2-tailed)		,268	,374	,317	,451	,067

a Test distribution is Normal.
b Calculated from data.

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas diketahui nilai signifikansi > 0,05 maka data dianggap normal. Dengan demikian alat uji yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu uji parametrik. Karena desain dalam penelitian ini adalah pengaruh dengan dua variabel bebas, maka uji parametrik yang digunakan yaitu regresi linier berganda.

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

1. Analisis Regresi

Mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian, maka model dalam penelitian yang digunakan adalah regresi liniear berganda. Adapun alasan penggunaan analisis ini adalah untuk menunjukkan hubungan pengaruh antara efektivitas pengendalian intern kas (X_1) dan perputaran piutang (X_2) terhadap likuiditas (Y). Selain itu untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh antara variabel bebas (X_1, X_2) dan variabel terikat (Y). Persamaan regresi linier berganda yaitu:

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + ei$

(Sudjana, 2001:348)

Keterangan:

Y = Likuiditas

a = Bilangan konstanta

b_1, b_2 = Koefisien regresi

X_1 = Efektivitas pengendalian intern kas

X_2 = Perputaran piutang

ei = Faktor lain di luar mode

2. Uji F atau uji simultan

Untuk mengetahui sejauh mana variabel efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang yang digunakan mampu menjelaskan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel likuiditas. Ha ditolak dan Ho diterima jika diperoleh nilai p value > 0.05, maka dapat

disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara efektivitas pengendalian inetrn kas dan perputaran piutang terhadap likuiditas secara keseluruhan. Sebaliknya Ha diterima dan Ho ditolak jika diperoleh nilai p value < 0.05, maka keputusan uji F adalah ada pengaruh efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap likuiditas secara keseluruhan.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinisi digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel. Nilai koefisien determinasi yang biasanya diberi simbol (R^2) menunjukkan hubungan pengaruh antara dua variabel yaitu variabel X (sebagai variabel independen, yaitu efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang) dan variabel Y (sebagai variabel dependen, yaitu tingkat likuiditas) dari perhitungan tertentu. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1. Nilai yang mendekati satu variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

4. Uji t atau uji parsial

Untuk melihat tingkat signifikasi tiap variabel regresi, variabel secara individu melalui hipotesis. Ha ditolak dan Ho diterima jika diperoleh nilai p value > 0.05, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap likuiditas. Sebaliknya Ha diterima dan Ho

ditolak jika diperoleh nila p value < 0.05, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara parsial antara efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap likuiditas. Maka keputusan uji t dapat diartikan tiap variabel secara individu. Pertama, efektivitas pengendalian intern kas (X_1) terhadap likuiditas (Y) yaitu apabila dengan meningkatkan indikator-indikator pengendalian intern kas 1 tingkat lebih baik maka likuiditas akan meningkat sebesar b_1 % (koefisian efektivitas pengendalian intern kas), dengan asumsi variabel lain konstan. Kedua, perputaran piutang (X_2) terhadap likuiditas (Y) yaitu apabila tingkat perputaran piutang mengalami peningkatan sebesar 1 kali maka likuiditas akan meningkat sebesar b_2 % (koefisien perputaran piutang), dengan asumsi variabel lain konstan.

3.7.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik tergantung dari apakah model regresi yang kita gunakan memenuhi asumsi-asumsi model regresi linier klasik. Terdapat tiga asumsi klasik, namun untuk penelitian ini hanya menggunakan satu asumsi klasik yaitu:

1. Multikolinieritas

   Salah satu dari asumsi model regresi linier klasik adalah bahwa tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel yang menjelaskan yang termasuk dalam model. Hubungan linier antara variabel independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan linier yang sempurna dan hubungan linier yang kurang sempurna. Gujarati

(1978:44) mengatakan bahwa adanya multikolinieritas masih menghasilkan estimator yang BLUE *(best linier unbiased estimator)* atau penaksir tak bias linier terbaik, tetapi menyebabkan suatu model mempunyai varians yang besar. Karena varians terus naik atau membesar jika ada multkolinieritas maka standar error juga membesar.

Oleh karena itu, dampak adanya multikolinieritas jika kita menggunakan teknik estimasi dengan metode OLS tetapi masih mempertahankan asumsi lain adalah sebagai berikut:

a) Estimator masih bersifat BLUE dengan adanya multikolinieritas namun estimator mempunyai varians dan kovarians yang besar sehingga sulit mendapatkan estimator yang tepat.
b) Akibat nomor 1, maka membuat variabel independen secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
c) Walaupun secara individu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen melalui uji *t* statistik, namun nilai koefisien determinasi *(r^2)* masih tinggi.

Ciri-ciri adanya gejala multikolinieritas adalah sebagai berikut:

a) Nilai r^2 tinggi tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan.

Model mempunyai determinasi (r^2) yang tinggi, tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen melalui uji *t*. Namun berdasarkan uji F secara

statistik signifikan yang berarti semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dalam hal ini terjadi kontradiktif melalui uji *t* yang secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, namun secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

b) Korelasi parsial antar variabel independen.

Jika koefisien korelasi antara variabel independen tinggi, maka diduga terjadi multikolinieritas. Masalah ini timbul terutama pada data *time-series*, dimana korelasi antar variabel independen cukup tinggi.

c) Menggunakan *Variance Inflator Factor (VIF).*

Melaui *output* komputer, multikolinieritas dapat dilihat dari tolerance dan lawannya *Variance Inflator Factor (VIF).* Jika nilai *tolerance* lebih kecil dari nilai VIF maka tidak terjadi multikolinieritas.

Adapun cara-cara untuk mengatasi mulktikolinieritas adalah sebagai berikut:

a) Menghilangkan salah satu variabel independen yang mempunyai korelasi linier kuat.

b) Transformasi variabel.

c) Penambahan data observasi.

2. Heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas merupakan uji adanya varians residual yang tidak konstan. Untuk menghilangkan heteroskedastisitas dalam model regresi yaitu melakukan transformasi dalam bentuk regresi dengan cara membagi model regresi dengan salah satu variabel bebas yang digunakan dalam model tersebut serta dengan melakukan ransformasi log. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat *scaterplot* antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Jika ada titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum KPRI di Kabupaten Kendal

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kendal sebelumnya bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN), tetapi setelah berlakunya UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian berubah nama menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). Tujuan utama KPRI di Kabupaten Kendal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Namun, tujuan yang tidak kalah pentingnya adalah membentuk wadah untuk mendidik anggotanya agar tumbuh menjadi insan koperasi yang loyal. Sedangkan dari segi sosial diharapkan juga dapat terjalin kekeluargaan yang lebih erat diantara para anggotanya dan juga masyarkat sekitarnya.

Objek penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang menjadi anggota Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) di Kabupaten Kendal yang berjumlah 85 KPRI. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 30 KPRI yang dijadikan sampel sesuai dengan karakteristik yang ditentukan peneliti. Dalam mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, KPRI di Kabupaten Kendal melakukan berbagai kegiatan usaha. Adapun bidang usaha yang dilakukan KPRI di Kabupaten Kendal meliputi usaha

perkreditan atau simpan pinjam, usaha pertokoan atau konsumsi dan usaha jasa yang meliputi ; foto copy, wartel, percetakan, sewa gedung dan sebagainya. Diantara usaha yang paling menonjol adalah kegiatan usaha di bidang perkreditan (simpan pinjam). Bidang usaha yang ada pada KPRI tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Usaha Perkreditan/Simpan Pinjam
   a. Perkreditan Uang

      Perkreditan uang merupakan usaha jasa dengan memberikan kredit uang dengan bunga rendah untuk membantu kesejahteraan anggotanya.

   b. Perkreditan Barang

      Perkreditan barang merupakan usaha jasa dengan memberikan kredit barang dengan bunga rendah.

2. Bidang Usaha Pertokoan

   Usaha pertokoan menyediakan kebutuhan barang-barang anggota dan bukan anggota. Barang yang disediakan berupa kebutuhan sehari-hari (konsumsi), pakaian, alat tulis kantor, dan sebagainya. Pembeli yang ada sebagian besar merupakan anggota.

3. Bidang Usaha Jasa
   a. Foto copy

      Dalam usaha jasa foto copy melayani instansi yang terkait dan masyarakat secara umum, tetapi kebanyakan para pemakai atau pelanggan foto copy ini dari kalangan sendiri atau instansi terkait.

b. Jasa pelayanan lain

Jasa pelayanan lainnya misalnya meliputi : wartel, percetakan, sewa gedung dan lain-lain.

4.1.2 Struktur Organisasi KPRI di Kabupaten Kendal

Organisasi merupakan wadah kerja sama dalam mencapai tujuan yang berhubungan dengan penentuan tugas dan tanggung jawab, pengelompokkan suatu kerja antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Agar organisasi suatu KPRI dapat berjalan dengan baik, perlu penyusunan dalam struktur organisasi sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dapat melaksanakan tugasnya sesuai pekerjaan masing-masing. Struktur organisasi KPRI di Kabupaten Kendal pada umumnya berbentuk lini dan staf karena mempunyai kelebihan adanya disiplin kerja dan keputusan rapat dapat diambil melalui pertimbangan yang baik. Adapun struktur organisasi KPRI di Kabupaten Kendal pada umunya adalah sebagai berikut:

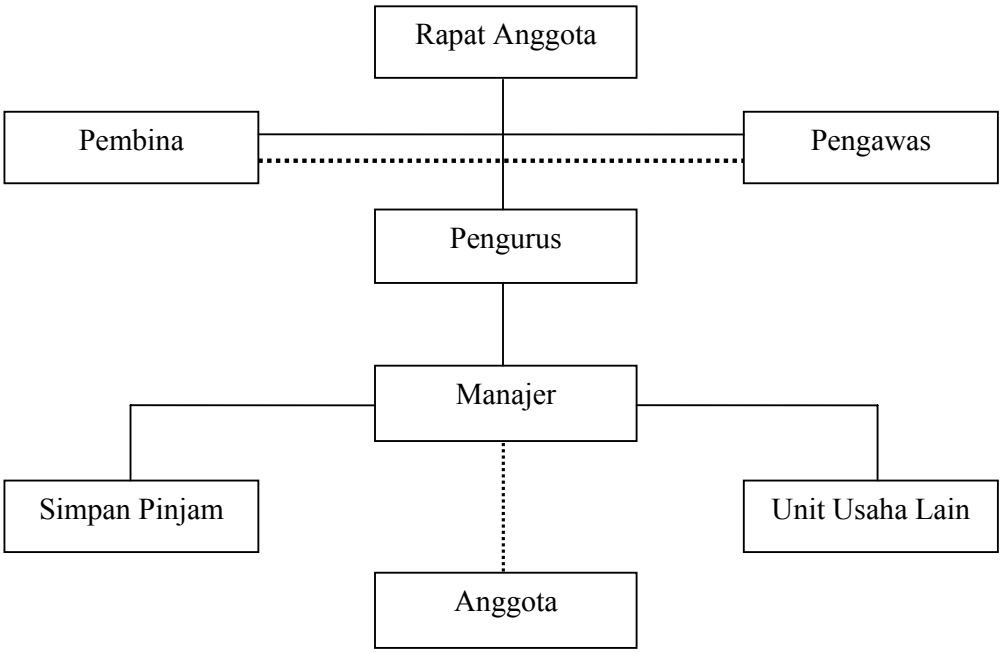

Gambar 2. Struktur Organisasi KPRI di Kabupaten Kendal

(Sumber: Data dinding KPRI di Kabupaten Kendal)

Keterangan :

= garis wewenang, tanggung jawab dan bimbingan

= garis koordinasi

= garis pelayanan

Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KPRI. Keputusan rapat sejauh mungkin diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Oleh karena itu, masing-masing anggota mempunyai hak suara yang sama dan rapat anggota juga berhak meminta kterengan dan pertanggungjawaban pengurus dan badan pengawas mengenai pengelolaan koperasi.

Pengurus

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala hal kegiatan pengelolaan usaha KPRI kepada rapat anggota dengan masa jabatan paling lama lima tahun berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar. Pengurus dapat mengangkat pengelola KPRI atau manajer untuk mengelola usaha KPRI. Adapun pengurus tersebut biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan pembantu.

Pengawas

Pengawas KPRI adalah orang-orang sebagai anggota yang diberi kepercayaan oleh seluruh anggota untuk mengadakan atau melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha KPRI. Sekurang-kurangnya tiga bulan sekali pengawas melakukan penelitian dan pembinaan pada kegiatan organisasi dan usaha KPRI yang hasilnya dilaporkan kepada pengurus secara tertulis dan salinannya dikirim kepada dinas koperasi kabupaten kendal. Pengawas juga mengikuti rapat dengan pengurus dalam langkah-langkah pengembangan usaha KPRI serta mengadakan rapat lengkap badan pengawas secara rutin untuk menghimpun materi dalam laporan baik triwulan maupun tahunan.

Manajer

Manajer adalah sebagai pelaksana tugas pengurus sehari-hari di bidang usaha koperasi. Tugas manajer adlah melaksanakan kegiatan usaha-usaha yang dipercayakan oleh pengurus, memimpin dan mengkoordinasikan pekerjaan karyawan yang berada di bawah

kepemimpinannya, mengatur jalannya keuangan dalam usaha koperasi serta mempertanggungjawabkan seluruh tugasnya kepada pengurus. Bila suatu saat manajer berhalangan dalam melaksanakan tugasnya maka akan diambil alih oleh pengurus atau seseorang yang ditunjuk oleh pengurus.

4.1.3 Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah efektivitas pengendalian intern kas, perputaran piutang, dan likuiditas.

a. Efektivitas Pengendalian Intern Kas

Berdasarkan hasil perhitungan tentang efektivitas pengendalian intern kas yang dinyatakan dalam persentase (%) pada KPRI di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada (lampiran 6). Perhitungan variabel tingkat efektivitas pengendalian intern kas adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{2930}{4350} \times 100\%$$

% = 67,36 %

Berdasarkan perhitungan diatas, tingkat efektivitas pengendalian intern kas sebesar 67,36% dan termasuk dalam kriteria efektif. Untuk analisis faktornya sebagai berikut:

1) Struktur Organisasi

Dalam sub variabel ini, data yang terkumpul diperoleh skor 426 (lampiran 6) dan skor total variabel efektivitas pengendalian intern kas 2930. Pada sub variabel struktur organisasi menyumbangkan

nilai sebesar 14,54% terhadap variabel efektivitas pengendalian intern kas.

2) Sistem Otorisasi

Dalam sub variabel ini, data yang terkumpul diperoleh skor 894 (lampiran 6) dan skor total variabel efektivitas pengendalian intern kas 2930. Pada sub variabel sistem otorisasi menyumbangkan nilai sebesar 30,51% terhadap variabel efektivitas pengendalian intern kas.

3) Praktik yang Sehat Melalui Bank

Dalam sub variabel ini, data yang terkumpul diperoleh skor 1303 (lampiran 6) dan skor total variabel efektivitas pengendalian intern kas 2930. Pada sub variabel praktik yang sehat melalui bank menyumbangkan nilai sebesar 44,47% terhadap variabel efektivitas pengendalian intern kas.

4) Kas Kecil Sistem Dana Tetap

Dalam sub variabel ini, data yang terkumpul diperoleh skor 307 (lampiran 6) dan skor total variabel efektivitas pengendalian intern kas 2930. Pada sub variabel kas kecil sistem dana tetap menyumbangkan nilai sebesar 10,48% terhadap variabel efektivitas pengendalian intern kas.

b. Perputaran Piutang

Tingkat perputaran piutang adalah perbandingan jumlah dari penjulan bersih dengan jumlah rata-rata piutang. Dengan demikian,

tingkat perputaran piutang menunjukkan kecepatan kembalinya modal kerja yang tertanam dalam piutang menjadi kas kembali melalui penagihan. Hasil perhitungan perputaran piutang pada KPRI di Kabupaten Kendal (lampiran 8) diperoleh rata-rata sebesar 35,39% dengan kriteria kurang ideal.

c. Likuiditas

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata diperoleh nilai likuiditas untuk masing-masing Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kendal (lampiran 12). Dari nilai tersebut kemudian dibuat rata-rata untuk dikriteriakan, untuk hasil perhitungan nilainya sebagai berikut:

1) *Current Ratio*

Sesuai yang tertulis pada bab III untuk mengkriteriakan tingkat likuiditas yang dinilai menggunakan *current ratio* pada KPRI digunakan pedoman pemeringkatan yang dibuat sendiri oleh peneliti yang disebut rata-rata KPRI. Hasil perhitungan *current ratio* didapat nilai terendah sebesar 197,26 % dan tertinggi sebesar 941,01%.

Tabel 4.1

Standar *current ratio*

Likuiditas	Standar	Nilai	Kriteria
Current Ratio	>494,78% - 569,16% atau >569,16%-643,54%	5	Sangat ideal
	>420,40% - 494,78% atau >643,54%-717,92%	4	Ideal
	>346,02% - 420,40% atau >717,92%-796,22%	3	Cukup ideal
	>271,64% - 346,02% atau >796,22%-870,60%	2	Kurang ideal
	≤197,26%- 271,64% atau >870,60%-≥944,98%	1	Sangat tidak ideal

Sumber: Data diolah

Nilai *current ratio* KPRI di Kabupaten Kendal sebesar 414,33% termasuk dalam kriteria cukup ideal.

2) *Acid Test Ratio*

Sesuai yang tertulis pada bab III untuk mengkriteriakan tingkat likuiditas yang dinilai menggunakan *acid test ratio* pada KPRI digunakan pedoman pemeringkatan yang dibuat sendiri oleh peneliti yang disebut rata-rata KPRI. Hasil perhitungan *acid test ratio* didapat nilai terendah sebesar 191,05 % dan tertinggi sebesar 924,44%.

Tabel 4.2

Standar *acid test ratio*

Likuiditas	Standar	Nilai	Kriteria
Acid test Ratio	>484,41% - 557,75% atau >557,75%-631,09%	5	Sangat ideal
	>411,07% - 484,41% atau >631,09%-704,43%	4	Ideal
	>337,73% - 411,07,% atau >704,43%-777,77%	3	Cukup ideal
	>264,39% - 337,73% atau >777,77%-851,11%	2	Kurang ideal
	≤191,05%- 264,39% atau >851,11%- ≥924,45%	1	Sangat tidak ideal

Sumber: Data diolah

Nilai *acid test r*atio KPRI di Kabupaten Kendal sebesar 402,62% dan termasuk dalam cukup ideal.

3) *Cash Ratio*

Sesuai yang tertulis pada bab III untuk mengkriteriakan tingkat likuiditas yang dinilai menggunakan *cash ratio* pada KPRI digunakan pedoman pemeringkatan yang dibuat sendiri oleh peneliti yang disebut rata-rata KPRI. Hasil perhitungan *cash ratio* terdapat nilai terendah sebesar 0,11% dan tertinggi 92,83%.

Tabel 4.3

Standar *cah ratio*

Likuiditas	Standar	Nilai	Kriteria
Cash	>37,19% - 46,46% atau >46,46%-55,73%	5	Sangat ideal
Ratio	>27,92% - 37,19% atau >55,73%-65,00%	4	Ideal
	>18,65% - 27,92% atau >65,00%-74,72%	3	Cukup ideal
	>9,38% - 18,65% atau >74,72%-83,54%	2	Kurang ideal
	≤0,11%- 9,38% atau >83,54%-≥92,84%	1	Sangat tidak ideal

Sumber : Data diolah

Nilai *cash ratio* KPRI di Kabupaten Kendal adalah sebesar 22,59% dan termasuk dalam cukup ideal.

4.1.4 Analisis Regresi

Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dalam hubungan efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap likuiditas dalam penelitian ini adalah regresi liniear berganda dengan dua prediktor. Variabel likuiditas (Y) dalam penelitian ini dinilai

dengan 3 (tiga) ratio yaitu *current ratio* (Y_1), *acid test ratio* (Y_2), *cash ratio* (Y_3). Sehingga dalam melakukan analisis regresi berganda peneliti melalui 3 tahap yang akan meghasilkan output 3 (tiga) persamaan regresi berganda. Hasil atau output 3 (tiga) persamaan regresi berganda akan disimpulakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara efektivitas pengendalian intern kas (X_1) dan perputaran piutang (X_2) terhadap likuiditas (Y) secara keseluruhan. Tiga tahapan analisis regresi berganda, sebagai berikut :

a. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kas dan Perputaran Piutang terhadap *Current Ratio*

1. Persamaan Regresi

Bentuk model yang digunakan adalah Y = a + b_1X_1 + b_2X_2+ ei. Hasil output dari analisis regresi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap *current ratio.* Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan program *SPSS (Statistical Program Solution Service) 15.0 for Windows* maka menghasilkan ouput yang dapat dilihat pada lampiran 15, jika diringkas seperti terangkum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4

Ringkasan analisis regresi efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap *current ratio*

Keterangan	Nilai
Konstanta (a)	-4,283
Koefisen efektivitas pengendalian intern kas (b_1)	0,072
Koefisien perputaran piutang (b_2)	0,009
F hit	15,121
Koefisien Determinasi (R^2)	0,528
Adjusted R^2	0,493
Koefisien regresi simultan (R)	0,727

Sumber : Hasil analisis pada lampiran 15

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dari hasil analisis sebagai berikut:

$$Y_1 = -4,283 + 0,072X_1 + 0,009X_2 + ei$$

2. Signifikansi pengaruh X_1 dan X_2 secara simultan terhadap *current ratio*

Berdasarkan hasil ANOVA atau F test menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} = 15,121 dengan signifikasi 0,000 jauh di bawah 0,05. Artinya semua variabel efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang (X_1 dan X_2) secara simultan berpengaruh terhadap *current ratio* (Y_1). Berdasarkan hasil perhitungan regresi *SPSS 15.0 for windows* (lampiran 15) dapat diketahui R^2 = 0, 528 artinya variabel *current ratio* dapat dijelaskan oleh variabel independen efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang (X_1 dan X_2) sebesar 52,8% dan sisanya 47,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ditetiliti.

3. Signifikansi pengaruh X_1 dan X_2 secara parsial terhadap *current ratio*

a) Pengujian parsial efektivitas pengendalian intern kas (X_1) terhadap *current ratio*

Berdasarkan hasil uji t diperoleh t_{hitung}= 3,421, dengan harga signifikan sebesar 0,002. Karena harga signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien regresi efektivitas pengendalian intern kas sebesar (b_1= 0,072). Artinya apabila efektivitas pengendalian intern kas mengalami kenaikan sebesar satu tingkat sedangkan variabel lain dianggap konstan, maka *current ratio* akan meningkat sebesar 0,072%.

b) Pengujian parsial perputaran piutang (X_2) terhadap *current ratio*

Berdasarkan hasil uji t diperoleh t_{hitung}= 0,995, dengan harga signifikan sebesar 0,328. Karena harga signifikansi yang diperoleh lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa persamaan regresi tersebut tidak signifikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial perputaran piutang terhadap *current ratio*.

b. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kas dan Perputaran Piutang terhadap *Acid Test Ratio*

1. Persamaan Regresi

Bentuk model yang digunakan adalah Y = a + b_1X_1 + b_2X_2+ ei. Hasil output dari analisis regresi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap *acid test ratio*. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan program *SPSS (Statistical Program Solution Service) 15.0 for Windows* maka menghasilkan ouput yang dapat dilihat pada lampiran 16, jika diringkas seperti terangkum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5

Ringkasan analisis regresi efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap *acid test ratio*

Keterangan	Nilai
Konstanta (a)	-4,324
Koefisen efektivitas pengendalian intern kas (b_1)	0,072
Koefisien perputaran piutang (b_2)	0,009
F hit	14,617
Koefisien Determinasi (R^2)	0,520
Adjusted R^2	0,484
Koefisien regresi simultan (R)	0,721

Sumber : Hasil analisis pada lampiran 16

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dari hasil analisis sebagai berikut:

Y_2 = -4,324+ 0,072X_1 + 0,009X_2+ ei

2. Signifikansi pengaruh X_1 dan X_2 secara simultan terhadap *acid test ratio*

Berdasarkan hasil ANOVA atau F test menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} = 14,617 dengan signifikansi 0,000 jauh di bawah 0,05. Artinya semua variabel efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang (X_1 dan X_2) secara simultan berpengaruh terhadap *acid test ratio* (Y_2). Berdasarkan hasil perhitungan regresi *SPSS 15.0 for windows* (lampiran 16) dapat diketahui R^2 = 0,520 artinya variabel *acid test ratio* yang dapat dijelaskan oleh variabel independen efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang (X_1 dan X_2) sebesar 52,0% dan sisanya 48,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ditetiliti.

3. Signifikansi pengaruh X_1 dan X_2 secara parsial terhadap *acid test ratio*

a) Pengujian parsial efektivitas pengendalian intern kas (X_1) terhadap *acid test ratio*

Berdasarkan hasil uji t diperoleh t_{hitung}= 3,379, dengan harga signifikan sebesar 0,002. Karena harga signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien regresi efektivitas pengendalian intern kas sebesar (b_1= 0,072). Artinya apabila efektivitas pengendalian intern kas mengalami kenaikan sebesar satu tingkat

sedangkan variabel lain dianggap konstan, maka *acid test ratio* akan meningkat sebesar 0,072 %.

b) Pengujian parsial perputaran piutang (X_2) terhadap *acid test ratio*

Berdasarkan hasil uji t diperoleh t_{hitung} = 0,959, dengan harga signifikan sebesar 0,346. Karena harga signifikansi yang diperoleh lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa persamaan regresi tersebut tidak signifikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial perputaran piutang terhadap *acid test ratio.*

c. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kas dan Perputaran Piutang terhadap *Cash Ratio*

1. Persamaan Regresi

Bentuk model yang digunakan adalah Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + ei. Hasil output dari analisis regresi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap *cash ratio.* Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan program *SPSS (Statistical Program Solution Service) 15.0 for Windows* maka menghasilkan ouput yang dapat dilihat pada lampiran 17, jika diringkas seperti terangkum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6

Ringkasan analisis regresi efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap *cash ratio*

Keterangan	Nilai
Konstanta (a)	-2,194
Koefisen efektivitas pengendalian intern kas (b_1)	0,039
Koefisien perputaran piutang (b_2)	0,014
F hit	8,466
Koefisien Determinasi (R^2)	0,385
Adjusted R^2	0,340
Koefisien regresi simultan (R)	0,621

Sumber : Hasil analisis pada lampiran 17

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dari hasil analisis sebagai berikut:

$$Y_3 = -2{,}194 + 0{,}039X_1 + 0{,}014X_2 + ei$$

2. Signifikasi pengaruh X_1 dan X_2 secara simultan terhadap *cash ratio*

Berdasarkan hasil ANOVA atau F test menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} = 8,466 dengan signifikansi 0,001 jauh di bawah 0,05. Artinya semua variabel efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang (X_1 dan X_2) secara simultan berpengaruh terhadap *cash ratio* (Y_3). Berdasarkan hasil perhitungan regresi *SPSS 15.0 for windows* (lampiran 17) dapat diketahui R^2 = 0,385 artinya variabel *cash ratio* yang dapat dijelaskan oleh variabel independen efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang (X_1 dan X_2) sebesar 38,5% dan sisanya 61,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ditetiliti.

3. **Signifikansi pengaruh X_1 dan X_2 secara parsial terhadap *cash ratio***

   a) **Pengujian parsial efektivitas pengendalian intern kas (X_1) terhadap *cash ratio***

   Berdasarkan hasil uji t diperoleh t_{hitung} = 1,869, dengan harga signifikan sebesar 0,073. Karena harga signifikansi yang diperoleh lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa persamaan regresi tersebut tidak signifikan. Koefisien regresi efektivitas pengendalian intern kas sebesar (b_1 = 0,740). Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial efektivitas pengendalian intern kas terhadap *cash ratio*.

   b) **Pengujian parsial perputaran piutang (X_2) terhadap *cash ratio***

   Berdasarkan hasil uji t diperoleh t_{hitung} = 1,533, dengan harga signifikan sebesar 0,137. Karena harga signifikansi yang diperoleh lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa persamaan regresi tersebut tidak signifikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial perputaran piutang terhadap *cash ratio*.

4.1.5 Uji Asumsi Klasik

1. **Multikolinearitas**

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variable bebas. Untuk mendeteksi multikolinearitas dapat dilakukan dengan mencari besarnya *variance inflaction factor* (VIF) dan nilai *tolerance*-nya. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance*-nya lebih dari 0,10 maka model regresi bebas dari multikolinearitas.

Tabel 4.7

Collinearity Statistic Efektivitas Pengendalian Intern Kas dan Perputaran Piutang

		Model	
		1	
		X_1	X_2
Collinearity Statistic	Tolerance	0,568	0,568
	VIF	1,761	1,761

Sumber : Hasil analisis pada lampiran 14, 15, 16

Tabel 4.6 terlihat bahwa semua variable nilai VIF-nya kurang dari 10 dan nilai *tolerance*-nya lebih dari 0,10 maka hubungan variable bebas dalam penelitian ini *rendah* (tidak berkorelasi). Jadi dapat diasumsikan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam regresi.

2. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan uji adanya varians residual yang tidak konstan. Uji ini dilakukan dengan melihat *scaterplot* antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Jika ada titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedesitas yang dilakukan melalui *SPSS 15.0 for windows* antara analisis regresi efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap *current ratio*

(lampiran 15), analisis regresi efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap *acid test ratio* (lampiran 16), analisis regresi efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap *cash ratio* (lampiran 17) menujukkan bahwa titik-titik menyebar di atas dan berada di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi adanya heterokedastisitas.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan ketiga persamaan yang dihasilkan oleh analisis regresi berganda yaitu Y_1 = -4,283+ 0,072X_1 + 0,009X_2+ ei , Y_2 = -4,324+ 0,072X_1 + 0,009X_2+ ei dan Y_3 = -2,194+ 0,039X_1 + 0,014X_2+ ei . Dimana Y_1 (*current ratio*), Y_2 (*acid test ratio*), Y_3 (*cash ratio*) merupakan tiga rasio (sub variabel) yang digunakan untuk menilai variabel likuiditas dapat dilihat bahwa variabel efektivitas pengendalian intern kas (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap *current ratio*, *acid test ratio* tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap *cash ratio*. Sedangkan variabel perputaran piutang (X_2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *current ratio*, *acid test ratio* dan *cash ratio*.

Pada kenyataannya, analisis penelitian ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa ada indikasi kas merupakan bagian terkecil dari aktiva lancar sehingga sebagian besar didominasi oleh piutang, kemungkinan untuk membayar utang dalam jangka pendek tidak mencukupi karena keadaan aktiva lancar kurang likuid, meskipun pengendalian internnya efektif.

Tingginya tingkat piutang ini terkait dengan KPRI di Kabupaten Kendal sebagian besar memberikan layanan simpan pinjam jangka panjang bagi anggotanya. Kondisi piutang yang tinggi akan memberikan dampak terhadap perubahan kas dalam kurun waktu relatif lama, sehingga kas kurang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan lainnya. Perencanaan kas belum menjadi kewajiban bagi koperasi. Tujuan KPRI adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggotanya, sehingga tidak begitu memperhatikan aspek bisnis sepenuhnya untuk memperoleh keuntungan. Hal inilah yang menyebabkan pengendalian intern kas tidak memberikan pengaruh langsung terhadap *cash ratio* yang diperoleh. Selain itu tidak dipisahnya pencatatan piutang jangka panjang dan piutang jangka pendek dalam laporan keuangan sehingga pengurus kurang bisa mendeteksi piutang jangka pendek yang merupakan komponen aktiva lancar dalam menghitung likuiditas.

Efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang haruslah ditingkatkan terus untuk kedepannya. Dengan efektivitas pengendalian intern kas yang semakin efektif dan perputaran piutang yang semakin cepat setiap tahunnya, maka diharapkan tingkat likuiditas KPRI akan semakin baik bahkan dapat memenuhi kriteria standar normal sangat ideal yang ditentukan oleh Departemen Koperasi dan UKM yaitu 175%-200%. Likuiditas yang baik akan menciptakan citra yang positif bagi KPRI di mata umum khususnya pihak pemberi kredit karena pihak pemberi kredit akan percaya dan yakin

dalam memberikan kreditnya kepada KPRI karena KPRI dinilai dapat mengembalikan kewajibannya dengan segera apabila jatuh tempo.

Pengurus sebagai pihak yang mengelola KPRI perlu mengambil langkah-langkah khusus agar tingkat likuiditas tercapai sesuai standar normalnya, misalnya pengurus KPRI harus jeli dalam menyeleksi piutang yang diajukan oleh para anggota agar tidak terjadi penumpukkan piutang, apalagi kebanyakan piutang yang diajukan oleh para anggota merupakan piutang jangka panjang yang waktu pelunasannya minimal 3 (tiga) tahun. Piutang yang terlalu tinggi akan menyebabkan perputaran piutang lambat berubah menjadi kas sehingga likuiditas melebihi normal apalagi tidak diimbangi dengan kas yang memadai baik kas di tangan maupun kas di bank. Pengurus juga harus bisa memanfaatkan kondisi piutang yang menganggur dengan cara menggunakan piutang tersebut sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya apabila memerlukan uang dengan segera sehingga piutang tidak banyak yang menganggur. Namun, pihak bank atau lembaga keuangan yang lain juga harus melihat bahwa piutang yang dijadikan jaminan itu memang benar piutang yang masih dalam jangka waktu sehingga akan benar-benar dilunasi oleh anggota. Bank atau lembaga keuangan lain juga harus memperhatikan tingkat likuiditas sebelum memberikan kredit karena likuiditas menunjukkan tentang tingkat kepastian jumlah kas yang diperoleh guna menjamin pengembalian kewajiban jangka pendeknya bila jatuh tempo.

Berdasarkan rata-rata rasio perputaran piutang pada KPRI di Kabupaten Kendal termasuk dalam kriteria kurang ideal. Hal ini disebabkan karena kebanyakan piutang yang diajukan oleh para anggota merupakan piutang jangka panjang yang waktu pelunasannya minimal 3 (tiga) tahun dan anggota hanya melakukan pelunasan dengan pemotongan gaji sebulan sekali sehinga butuh waktu yang relatif lama untuk mengubah piutang manjadi kas. Periode perputaran piutang dipengaruhi oleh panjang pendeknya ketentuan waktu yang disyaratkan dalam syarat pembayarannya. Semakin lama syarat pembayaran kredit, berarti semakin lama terikatnya modal kerja tersebut dalam piutang dan menandakan semakin kecil tingkat perputaran piutang dalam satu periode (Riyanto, 2001:90). Penerapan kebijakan baru tentang piutang perlu dibuat oleh pihak KPRI misalnya terkait dengan syarat pembayaran piutang dan untuk para anggota diharapkan berpartisipasi secara aktif dengan membayar piutang tepat waktu sehingga tidak terjadi penumpukan piutang dan dapat meningkatkan perputaran piutang. Sedangkan dari segi manajemen administrasi, hendaknya melakukan pencatatan terpisah antara pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek serta untuk merangsang supaya piutang cepat tertagih dapat dilakukan dengan memberikan hadiah kepada para debitur yang melunasi pinjaman secara teratur dan tepat waktu pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan perhitungan rata-rata rasio likuiditas pada KPRI di Kabupaten Kendal dapat dinyatakan bahwa KPRI dalam keadaan cukup likuid, artinya KPRI di Kabupaten Kendal mempunyai cukup alat likuid atau

alat pembayaran yang cukup besarnya untuk memenuhi kewajiban yang segera dipenuhi. Meskipun KPRI di katakana cukup likuid tetapi belum tentu dapat memenuhi kewajiban yang segera dipenuhi, apabila pihak kreditur tiba-tiba menagih kewajiban tersebut. Hal ini disebabkan karena tingginya aktiva lancar yang didominasi oleh piutang. Tingginya tingkat piutang disebabkan karena pihak KPRI lebih memberikan pelayanan pinjaman jangka panjang kepada anggota dan pencatatan pinjaman jangka panjang tersebut dijadikan satu dengan pinjaman jangka pendek. Di satu sisi, tingginya aktiva lancar juga memberikan kemudahan bagi KPRI dalam memenuhi hutang lancarnya dengan segera, akan tetapi di sisi lain tingginya aktiva lancar yang dimiliki menandakan bahwa banyaknya dana yang tertanam dalam aktiva lancar dan manajemen yang kurang efektif dalam mengelolanya. Untuk mencapai keadaan yang lebih likuid bisa ditempuh dengan cara manajemen mengurangi jumlah aktiva lancar terutama piutang dengan melakukan investasi pada aktiva yang lebih produktif dan memperkuat alat-alat likuid terutama kas dan melakukan pencatatan terpisah antara pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek.

Berdasarkan analisis regresi linier berganda dapat dipahami juga bahwa efektifitas pengendalian intern kas berpengaruh secara signifikan terhadap *current ratio, acid test ratio* namun tidak mempengaruhi *cash ratio*. Efektifitas pengendalian intern kas yang masuk dari penjualan tunai dan piutang akan aman karena adanya struktur organisasi dengan adanya pemisahan fungsi-fungsi yang menjalankan tugasnya secara benar. Pemisahan

tugas antar fungsi untuk menghindari akuntan KPRI melakukan kecurangan yaitu dengan merubah catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukannya. Sehingga adanya pemisahan tugas antar fungsi tersebut menjaga kekayaan koperasi dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan dilaksanakannya setiap transaksi oleh berbagai fungsi akan tercipta adanya pelaksanaan pengecekan secara intern pekerjaan setiap fungsi oleh fungsi yang lain. Selain struktur organisasi yang baik efektifitas pengendalian intern kas juga diciptakan dengan sistem otorisasi yang jelas, praktik yang sehat melalui bank dan kas kecil sistem dana tetap.

Sistem otorisasi yang diciptakan oleh KPRI menutup kemungkinan pencurian terhadap kas sehingga kas yang ada menjadi aman. Adanya sistem otorisasi yang baik meliputi penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhi cap ”lunas” pada faktur penjualan tunai, penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap ”sudah diserahkan” pada faktur penjualan tunai, dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas dibubuhi cap ”lunas”oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. setiap transaksi pelunasan piutang, terjadinya utang dan pengeluaran kas diotorisasi oleh yang berwenang, sehingga transaksi-transaksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pencatatan jurnal pengeluaran didasarkan bukti kas keluar yang telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang dengan dilampiri

bukti pendukung, maka akan menjamin jumlah kas yang ada sesuai dengan catatan dan catatan akuntansi tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Praktek yang sehat melalui bank tercipta dari penggunaan formulir bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggung jawabkan, hal ini dilakukan untuk mengawasi semua transaksi keuangan yang terjadi, jumlah uang kas yang diterima disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan tanggal terjadi transaksi atau hari kerja berikutnya, sehingga akan menguji ketelitian dan keandalan data akuntansi (jurnal kas KPRI). Pengecekan pada penggunan rekening koran dan pengecekan apabila menggunakan cek untuk mengecek ketelitian catatan kas. Bagian kassa juga dilengkapi dengan alat-alat yang memadahi seperti alat pendeteksi uang palsu, mesin register kas, dan sebagainya yang merupakan perlengkapan bagian kassa untuk melindungi kas yang ada.

Pengendalian kas kecil sistem dana tetap perlu dilakukan oleh KPRI untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah kecil. Kas kecil sistem dana tetap diciptakan melalui Pengeluaran kas yang menyangkut jumlah kecil dilakukan dengan dana kas kecil, hal ini dilakukan untuk memungkinkan pengeluaran kas dengan tunai. Pengisian dana kas kecil dilakukan setiap bulan sesuai dengan jumlah rupiah yang tercantum dalam bukti transaksi pengeluaran kas serta membuat laporan kas harian, dengan demikian pengawasan terhadap kas kecil mudah dilakukan.

Dengan adanya efektifitas pengendalian intern kas yang diciptakan oleh pihak KPRI Kabupaten Kendal yang efektif akan menjamin kas untuk selalu

aman dari berbagai hal kemungkinan yang tidak diinginkan. Sehingga jumlah penerimaan kas dan pengeluaran kas selalu dapat diawasi dan benar-benar sesuai dengan posnya. Apabila pihak KPRI Kabupaten Kendal lebih meningkatkan pelaksanakan serangkaian konsep pengendalian intern kas diatas dengan baik maka dapat mendukung likuiditas dalam arti dengan adanya hal tersebut akan terjadi *internal control* tehadap penerimaan dan pembayaran kas yang menunjang likuiditas sebagai kemampuan koperasi dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya pada saat ditagih sebab dalam hal ini antara lain terkait pada modal yang diperoleh koperasi antara lain dari pihak kreditur. Dengan likuiditas yang baik sebagai salah satu alat analisis yang datanya harus akurat dan dapat diandalkan maka akan mencerminkan citra yang baik pada koperasi tersebut.

Hasil dari penelitian ini mengatakan efektivitas pengendalian intern kas mempengaruhi likuiditas sesuai dengan pernyataan Muslich (2000:99) yang menyatakan bahwa perusahaan perlu melakukan pengelolaan manajemen kas secara tepat yang dilakukan antara penerimaan dan pengeluaran kas. Sinkronisasi yang tepat dapat dilakukan dalam bentuk pengendalian intern penerimaan kas dan pengendalian intern pengeluaran kas agar tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan uang kas. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Endah Tri Hastuti (2006) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh pengendalian intern penerimaan kas dan pengendalian intern pengeluaran kas terhadap likuiditas pada KPRI di Kabupaten Kudus. Penelitian Ana Sufiyanti (2007) yang menunjukkan bahwa efektivitas

pengendalian intern kas memberikan pengaruh terhadap indikator likuiditas pada KPRI di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yaitu *current ratio, acid test ratio,* dan *cash ratio*.

Hasil penelitian yang lainnya adalah perputaran piutang tidak mempengaruhi likuiditas. Hal ini tidak sejalan dengan pernyataan Wild, Subramanyam dan Robert (2005:197) yang menyatakan bahwa likuiditas mengacu pada kecepatan konversi piutang menjadi kas dimana perputaran piutang adalah ukuran kecepatan ini. Penelitian ini juga bertentangan dengan hasil penelitian Mohammad Nur (2008) yang menunjukkan pengaruh signifikan antara perputaran piutang dan pengumpulan piutang terhadap likuiditas perusahaan pada CV. Bumi Sarana Jaya di Gresik. Perputaran piutang tidak mempengaruhi likuiditas karena data-data piutang yang ada pada KPRI di Kabupaten Kendal tidak disusun sesuai aturan sebenarnya yaitu akuntansi perkoperasian, misalnya tingginya jumlah piutang yang tidak disertai dengan penjelasan sehingga peneliti kesulitan dalam melakukan pengklasifikasian dan penghitungan rata-rata piutang dalam satu tahun. Hal serupa juga terjadi pada akun penjualan dimana tidak dijelaskan yang mana penjualan kredit ataupun tunai dan penjualan tersebut termasuk dalam penjualan barang atau pinjaman uang dalam setahun, sehingga peneliti kembali mengalami kesulitan dalam melakukan pengklasifikasian dan penghitungan penjualan bersih untuk menghitung perputaran piutang dalam setahun. Timbulnya hal tersebut menyebabkan peneliti mengalami banyak kesulitan dan hasil penelitian inipun ada yang tidak sesuai dengan landasan

teori yang disebutkan. Hal inilah yang menyebabkan perputaran piutang tidak memberikan pengaruh terhadap *current ratio, acid test ratio*, dan *cash ratio*.

Penelitian ini mengindikasikan secara empiris dapat dipahami bahwa dengan adanya efektifitas pengendalian intern kas yang berupa pelaksanaan konsep pengendalian intern yang baik yang meliputi struktur organisasi, sistem otorisasi, praktek yang sehat melalui bank serta kas kecil sistem dana tetap dan perputaran piutang yang baik akan berpengaruh pada likuiditas koperasi sebagai kemampuan koperasi dalam membayar dihubungkan dengan pihak luar (kreditur) sebagai likuiditas badan usaha dalam dimensi waktu 2007 dan dimensi tempat pada KPRI di Kabupten Kendal. Likuiditas sebagai alat analisis yang datanya akurat dan dapat diandalkan sehingga menimbulkan citra positif bagi koperasi terbukti adanya.

BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian secara keseluruhan hasil penelitian tentang efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap likiditas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kendal, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Efektivitas pengendalian intern kas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kendal termasuk dalam kriteria efektif dengan persentase sebesar 67,36%.
2. Perputaran piutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kendal sebesar 35,39% dengan kriteria kurang ideal.
3. Nilai *current ratio* sebesar 414,33% dalam kriteria cukup ideal. *Acid test ratio* sebesar 402,62% dalam kriteria cukup ideal. *Cash ratio* sebesar 22,59% dalam kriteria cukup ideal.
4. Secara simultan terdapat pengaruh signifikan efektivitas pengendalian intern kas dan perputaran piutang terhadap *current ratio*, *acid test ratio*, *cash ratio* pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kendal. Sedang secara parsial efektivitas pengendalian intern kas berpengaruh secara signifikan terhadap *current ratio*, *acid test ratio*, sedangkan terhadap *cash ratio* tidak berpengaruh secara signifikan. Demikian dengan perputaran piutang yang tidak berpengaruh terhadap

current ratio, acid test ratio, cash ratio pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kendal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kendal hendaknya mempertahankan dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern kas yang telah ada misalnya saja pengawas KPRI selalu mengadakan pengecekan rutin setiap bulannya terhadap penerimaan dan pengeluaran kas baik pencatatan maupun jumlah uang kas yang ada.
2. Perputaran piutang perlu ditingkatkan pada titik yang optimal, seperti merangsang para anggota misalnya saja memberikan hadiah agar dapat berpartisipasi secara aktif membayar piutang tepat waktu pada saat jatuh tempo sehingga tidak terjadi penumpukan piutang, karena piutang sudah menjadi kas berarti kas akan dapat digunakan kembali dan KPRI tidak mempunyai dana yang menganggur.
3. Pihak KPRI hendaknya meningkatkan likuiditas pada tingkat yang sangat ideal. Hal ini dapat dilakukan misalnya pihak KPRI melakukan pembinaaan atau pelatihan terhadap karyawan KPRI tentang pentingnya likuiditas dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK tentang akuntansi koperasi sehingga pengkategorian rekening dalam laporan keuangan tepat hal ini dilakukan supaya dalam penghitungan likuiditas

maupun perputaran piutang tidak terjadi kesalahan dalam pengelompokkan rekening yang harus dihitung, sehingga akan didapat likuiditas yang sangat ideal.

4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai hal-hal yang mempengaruhi likuiditas dan bagi peneliti selanjutnya hendaknya lebih mengeksplor laporan keuangan koperasi terutama tentang pengelompokkan piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang sehingga dapat lebih jelas dihitung piutang jangka pendek yang menjadi unsur dari penghitungan likuiditas.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto , Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE

Damador, Gujarati. 1978. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Desyanti, Ni Putu Eka dan Ni Made Dwi Ratnadi.2005. *Pengaruh Independensi, Keahlian* Profesional, *Dan Pengalaman Kerja Pengawas Intern Terhadap Efektivitas Penerapan Struktur Pengendalian Intern Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Badung*. http://www.udayana.ac.id

Farihah , Durratul. 2006. *Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kas terhadap Likuiditas pada KPRI di Kabupaten Kebumen Tahun 2002-2004*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang

Hastuti , Endah Tri. 2006. *Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Kas dan Pengaruhnya terhadap Likuiditas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kudus.* Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang

Husnan, Suad. 1998. *Manajemen keuangan teori dan penerapan*. Yogyakarta: BPFE

Indriyo. *2000. Manajemen Keuangan. Yogyakarta : BPFE*

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi.* Jakarta : Salemba Empat

Munawir, S. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty

Muslich, M. 2000. *Manajemen Keuangan Modern*. Jakarta : Bumi Aksara

Nur, Mohammad. 2008. *Pengaruh Perputaran Piutang dan Pengumpulan Piutang terhadap Likuiditas Perusahaan pada CV. Bumi Sarana Jaya di Gresik*. http//www.umg.ac.id

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No.22/PER/M.KUKM/VI/2007 *Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi*. Jakarta: Dinkop dan UKM

Rakhmawati, Julia. 2006. *Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Aktivitas terhadap Return On Asset (ROA) pada Unit Usaha Pertokoan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kendal*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang

Riyanto , Bambang. 2001. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta : BPFE

Stice, Earl K., James D. Stice, dan K. Fred Skousen. 2004. *Intermediate Accounting*. Jakarta: salemba empat

Sudjana. 2001. *Metoda Statistik*a. Bandung: TARSITO

Sufiyanti, Ana. 2007. *Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kas Terhadap Likuiditas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang

Sugiyono. 2005. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA

Suharli, Michell, dan Megawati Oktorina.2005. *Memprediksi Tingkat Pengembalian Investasi Pada Equity Securities Melalui Rasio Profitabilitas, Likuiditas, Dan Hutang Pada Perusahaan Publik Di Jakarta*.Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo

Tunggal, Amin Widjaja. 1997. *Akuntansi Untuk Perusahaan Kecil & Menengah*. Jakarta : Rineka Cipta

Tunggal, Amin Widjaja. 1995. *Struktur Pengendalian Intern*. Jakarta : Rineka Cipta

Umar, Husein. 2001. *Riset Akuntansi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Weston, J.Fred, dan Thomas E.Copeland. 1994. *Manajemen Keuangan*. Jakarta : Penerbit Erlangga

Wild, John.J, K.R. Subramanyam, Robert F. Halsey. 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat

Yadnyana, I Ketut.2005. *Pengaruh Frekuensi Audit Atas Laporan Keuangan Historis Terhadap Keandalan Struktur Pengendalian Intern Pada Perusahaan Di Kota Denpasar*. http://www.udayana.ac.id